

INISIASI WWF – INDONESIA DALAM PROGRAM KONSERVASI

KAWASAN PERAIRAN PANTAI SEBANJAR UNTUK

PENGEMBANGAN

PARIWISATA BERKELANJUTAN



SKRIPSI

Disusun sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana (S1) pada program studi Ilmu Hubungan Internasional

Oleh

Samson Fernando Tellu

45 13 023 013

JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK

UNIVERSITAS BOSOWA

2018

HALAMAN PENGESAHAN

**INISIASI WWF – INDONESIA DALAM PROGRAM KONSERVASI KAWASAN
PERAIRAN PANTAI SEBANJAR UNTUK PENGEMBANGAN PARIWISATA
BERKELANJUTAN**

Samson Fernando Tellu

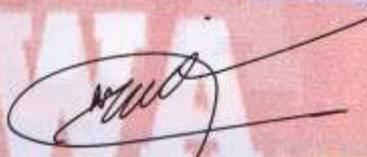
45 13 023 013

Skripsi Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Zulkhair Burhan, S.Ip, MA


Finahlivah Hasan S.Ip, M.A

Diketahui Oleh:

Dekan FISIP Universitas Bosowa

Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional


Arief Wicaksono, S.ip, MA



Zulkhair Burhan, S.Ip, MA

HALAMAN PENERIMAAN

Pada Hari Senin, Tanggal Dua Puluh Lima September Tahun Dua Ribu Tujuh Belas Skripsi dengan Judul **“Inisiasi WWF – Indonesia Dalam Program Konservasi Kawasan Perairan Pantai Sebanjar Untuk Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan”**

Nama : Samson Fernando Tellu

Nomor Induk : 45 13 02 30 13

Jurusan : Ilmu Politik

Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional

Telah Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperole Sarjana Strata Satu (S-1) Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar.

Pengawas Umum :


Arief Wicaksono, S.Ip, M.A
Dekan Fisip Universitas Bosowa

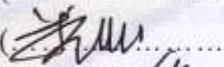
Panitia Ujian :


Arief Wicaksono, S.Ip, M.A
Ketua


Finahliyah Hasan, S.Ip., M.A
Sekretaris

TIM Penguji :

1. Arief Wicaksono, S.Ip, M.A
2. Fivi Elvira Basri, S.Ip.M.A.
3. Zulkhair Burhan, S.Ip, MA
4. Finahliyah Hasan, S.Ip, M.A


(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

ABSTRAK

Samson Fernando Tellu, Inisiasi WWF – Indonesia Dalam Program Konservasi Kawasan Perairan Pantai Sebanjar untuk Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan. Di bawah bimbingan, Pembimbing 1, Zulkhair Burhan, S.Ip., MA dan Pembimbing II Finahliyah Hasan, S.Ip., MA.

Penelitian pada skripsi ini bertujuan untuk mengetahui : Peluang Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan Di Pantai Sebanjar Melalui Inisiasi Wwf – Indonesia Dalam Program Konservasi Kawasan Perairan

. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian kualitatif. Pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah melalui pengumpulan dengan cara mengadakan wawancara berupa wawancara langsung (*direct Interview*) dan wawancara tidak langsung (*indirect interview*), serta laporan – laporan, jurnal, dan artikel yang didapatkan dari tempat penelitian, dan buku – buku yang berkaitan dengan objek penelitian. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis data kualitatif yang diperoleh melalui penelitian lapangan.

Hasil temuan dari penelitian ini adalah Dengan adanya program KKPD yang dirancang oleh pemerintah Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur, Program ini ditujukan untuk pembangunan dan peningkatan sektor pariwisata diharapkan mampu mendongkrak perekonomian daerah yang nantinya akan dapat mengatasi masalah – masalah primer seperti pembangunan sumberdaya manusia, penuntasan kemiskinan di kawasan konservasi pesisir Pantai Sebanjar Kabupaten Alor,

Kata Kunci : Inisiasi WWF – Indonesia Dalam Program Konservasi Kawasan Perairan, peluang dan pengembangan.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Tuhan yang maha kuasa. terimakasih Tuhan Yesus . Karena atas berkat dan rahmatMu lah penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan sebaik – baiknya dengan lancar tanpa kendala dan tepat waktu.. Skripsi ini merupakan karya tulis ilmiah yang menjadi syarat atas gelar sarjana yang ingin diraih pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Bosowa.

Dalam proses penyusunan skripsi ini memang banyak terdapat rintangan yang harus di lalui mulai dari perkuliahan dengan proses belajar yang ditempuh selama kurang lebih 5 tahun yang didalamnya sebelum harus menyelesaikan skripsi, kita harus melewati ujian seminar proposal, KKN, kemudian tahap penyelesaian yang sampai pada penulisan skripsi. Tidak mudah memang menyelesaikan sesuatu yang bisa disebut sebagai sebuah amanah dalam menempuh pendidikan. Namun sesulit sulitnya menyelesaikan pendidikan ini akan lebih sulit mempertanggungjawabkan gelar sarjana yang melekat setelah nama.

Meski skripsi ini telah dianggap selsai oleh penulis, akan tetapi pasti masih terdapat banyak kekurangan di dalamnya. Untuk itu, saya sebagai penulis dengan sangat terbuka menerima saran dan kritikan yang ingin diberikan namun tolong jika bisa jangan yang bersifat menjatuhkan tetapi berupa kritik dan saran yang bersifat membangun.

Satu amanah dalam hidup ini telah selesai untuk itu saya ingin mengucapkan segudang terima kasih semua pihak yang mendukung dan

mengorbankan waktunya demi mendorong selesainya skripsi ini. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih kepada :

1. Terima kasih Kepada kedua orang tuaku ibu yohana Tellu Diang dan bapak Yulius tellu (Alm) yang telah mendidikku hingga saat ini dan tanpa lelah mengajarku arti kehidupan.
2. Terimakasih juga buat keluarga besar Tellu yang telah memberi semangat dalam suka maupun duka, terimakasih juga buat pacar tersayang Yosi DopongTonung yang tanpa lelah memberikan dorongan dalam suka maupun duka, terimakasih juga buat saudara Norman yang selalu memberikan motivasi dan semangat dalam pengerjaan skripsi ini.
3. Terima Kasih kepada semua dosen yang tidak pernah lelah mengajarku, terkhusus kepada dosen – dosen HI UNIBOS Pak Arief Wicaksono, Pak Zulkhair Burhan, Ibu Finahliyah Hasan, Ibu Rosnani, Kak Asyari Mukrim, dan kakanda se alamamater Fivi Senpai dan Kak Beche Bt. Mamma. Semoga gelar yang didapat bisa dipertanggungjawabkan.
4. Terima kasih kepada kakanda – kakanda senior dan adinda – adinda di HIMAHI UNIBOS. Tetap bereproses tunjukkan kalau HI adalah jurusan terbaik dan himpunan sebagai Organisasi Intra terbaik kampus yang mampu menjadi panutan Organisasi Intra kampus UNIBOS lainnya.

5. Terima kasih kepada teman teman, saudaraku sesama kader HI angkatan 2013. Ega, Ila Tami, Puput, Baya, Salmah, Rudi, Edward, Norman, Tomi, Idris, Ulfa, Anita, Indah, Nunu, Ichal, Gufran, Arief, Ebar, Defi, Mila, Novi, Adrianto, Ipul, Wawa, Gita, Mega, Ryan, Nirmalasari, dan yang lainnya maaf kalau ada yang tidak di sebut. Semuanya gak bakal di lupakan.
6. Terima kasih kembali kepada kak Fnahliyah Hasan dan pak Zulkhair Burhan Sebagai Pembimbing yang membantu saya menyelesaikan tugas keramat ini.
7. Terima Kasih kepada Ibu Rahmah, Ibu Mega, , yang telah menjadi tempat bertanya tentang semua hal mengenai kampus dalam hal administratif.
8. Dan terima kasih kepada semua teman teman KKN Desa Bonto Ramba Kabupaten gowa, ceritaku, ceritamu, dukaku, dukamu tak akan sirna meski gelar sudah di dapat.
9. Serta terima kasih kepada semua pihak yang membantu saya menyelesaikan amanah pendidikan ini yang tidak sempat saya sebut satu persatu. Semoga Allah membalas seluruh kebaikan kalian.

Makassar, 4 September 2018

Samson Fernando Tellu

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENERIMAAN	iii
ABSTRAKSI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
E. Kerangka Konseptual	6
F. Metode Penelitian.....	10
1. Tipe Penelitian.....	10
2. Jenis dan Sumber Data	10
3. Teknik Pengumpulan Data	11
4. Teknik Analisis Data	11
G. Rancangan dan Sistematika Pembahasan.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pariwisata Berkelanjutan.....	12
B. Organisasi Internasional.....	21
BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	
A. Pengelolaan Wisata Kabupaten Alor.....	27
B. Program Konservasi Pesisir WWF Indonesia di Pantai Sebanjar.....	28
A. Profil Pantai Sebanjar	28
B. Profil WWF - Indonesia.....	30

C. Peran WWF – Indonesia Di Pantai Sebanjar	
Dalam Program Konservasi pesisir	31

BAB IV PEMBAHASAN

A. Program Konservasi Pesisir WWF Indonesia	34
A.1. Pemanfaatan Zonasi wilayah perairan.....	35
A.2. Fasilitator Dalam Setiap Usaha Dan Penerapan Pariwisata Berkelanjutan	37
A.3. Edukasi Kepada Masyarakat.....	40
A.4. Pengelolaan Dan Pemanfaatan Potensi Kawasan Pesisir Sebagai Wujud Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan Dalam Program KKPD Alor	43
Kontribusi Program Konservasi Pesisir WWF – Indonesia Terhadap Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan Di Pantai Sebanjar.....	46
B.1. Pembangunan Aspek Ekonomi, Sosial Dan Lingkungan Melalui Program Konservasi Pesisir WWF Indonesia	50
B.2. Pengusahaan Dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi	57

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	72
B. Saran	73

DAFTAR PUSTAKA	viii
-----------------------------	-------------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kawasan pesisir di Indonesia, selama ini selalu identik dengan kawasan yang tertinggal dan menjadi tempat tinggal masyarakat miskin. Hal ini pula di rasakan oleh warga pesisir pantai sebanjar kabupaten Alor, provinsi Nusa Tenggara Timur. Permasalahan di wilayah pantai tersebut tidak jauh beda dengan orang – orang yang hidup dan bertempat tinggal di wilayah pesisir. Keterbatasan akan akses pendidikan, dan aspek sosial lainnya menjadi segenap permasalahan warga sekitar, ditambah lagi dengan minimnya lapangan kerja karena pola hidup masyarakat yang cenderung monoton diakibatkan warga hanya bertumpu pada mata pencaharian sebagai nelayan dan petani.

Tidak hanya berhenti sampai disitu, masalah lain yang di alami oleh warga pesisir pantai juga berdampak pada pengembangan sumberdaya manusia dan pemanfaatan potensi wilayah pesisir pantai sebagai faktor pendorong perekonomian warga yang selama ini menjadi permasalahan inti di kawasan tersebut. Kurang difungsikannya pesisir pantai sebagai sebuah potensi pariwisata mengakibatkan tidak terjaminnya akses pendidikan yang layak sehingga masyarakat kurang mampu membangun kesadaran terhadap potensi wilayahnya.

Dalam rangkah tujuan pencapaian pengembangan potensi pariwisata tersebut, maka pembangunan sektor pariwisata diharapkan mampu tetap menjaga keberlangsungan serta kelestarian ekosistem lingkungan dengan tetap

memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat lokal, agar tetap di pertahankan dan dapat di nikmati oleh generasi jaman sekarang dan yang akan datang. Dengan kata lain pembangun pariwisata berkelanjutan, harus dapat mengelola dan mengembangkan seluruh kualitas lingkungan daerah tujuan wisata dan warisan budaya serta menjamin manfaat aktifitas kepariwisataan dan distribusi ekonomi terhadap masyarakat secara luas dan dalam jangka waktu yang lama.¹

Di kabupaten alor sendiri, di kota yang di kenal sebagai kota kenari ini, mulai membenahi aspek pariwisatanya yang dapat di lihat dari upayah pemerintah daerah setempat yang kemudian mulaiseri untuk memfokuskan bidang pariwisata sebagai salah satu faktor utama dalam mendorong perekonomian daerah.

Melihat banyaknya potensi pariwisata di pulau alor yang tersembunyi seperti budaya unik dari Alorese sebaiknya diamati di antara kelompok masyarakat adat Takpala yang tinggal di Desa Lembur Barat, Utara-Tengah Alor. Takpala masih melestarikan pembangunan perumahan tradisional yang menyerupai piramida, ditutupi dengan daun kelapa, dinding anyaman bambu, dan empat pilar kayu utama.

Pulau Alor juga dikenal sebagai pulau Seribu Moko. Moko adalah gendang perunggu kecil yang diyakini berasal dari budaya Dong Son Vietnam. Namun, hal itu tetap menjadi misteri bagaimana prasejarah drum Dong Son ini tiba di Alor. Legenda setempat mengatakan bahwa moko itu ditemukan terkubur di dalam tanah. Untuk mengamati artefak unik, dapat mengunjungi Museum

¹ <http://www.pedomanwisata.com/wisata-bahari-pantai/diving/kepulauan-alor-wisata-bahari-yang-menakjubkan-di-ujung-timur-flores>

Seribu Moko terletak di kota utama Kalabahi, di Pulau Alor. Museum juga menampilkan koleksi pakaian tenunan tangan Alor yang berbeda yang disebut Kawate.

Dalam memberlakukan upaya pengelolaan pariwisata yang baik khususnya, di kawasan pesisir pantai dibutuhkan suatu aspek yang tidak kalah pentingnya dengan keterlibatan stakeholder atau pemangku kepentingan, yaitu aspek keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan pariwisata agar dapat berjalan dengan semaksimal mungkin.

Dalam sebuah pengelolaan pariwisata yang baik, haruslah melibatkan masyarakat sebagai suatu aspek yang penting, dikarenakan keterlibatan masyarakat dapat mendorong terwujudnya tujuan dari pembangunan pariwisata di kawasan pesisir pantai termasuk pantai Sebanjar Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Keterlibatan masyarakat sekitar pantai akan mampu mendorong terciptanya harmonisasi diantara para pemangku kepentingan dengan masyarakat sekitar Pantai yang tinggal dan hidup disana. Hal ini akan membentuk pola perilaku masyarakat yang akan mampu menciptakan kondisi lingkungan yang baik dalam menjalankan suatu kebijakan mengenai pariwisata.

Dengan dilibatkannya masyarakat dalam pengelolaan pariwisata maka hal tersebut akan menumbuhkan kesadaran di tengah – tengah kehidupan mereka tentang pentingnya merawat dan menjaga kelestarian lingkungan dan ekosistem untuk merawat dan menjaga kemurnian potensi bahari yang terdapat di kawasan pesisir pantai tersebut sehingga hal ini akan berlanjut dan berkesinambungan untuk generasi – generasi berikutnya di masa depan.

Untuk itu organisasi non pemerintah (NGO) seperti WWF bekerjasama dengan pihak pemerintah Indonesia untuk membuat suatu kerjasama konservasi perairan utamanya di pesisir pantai. Konservasi wilayah pesisir. Program konservasi ini termasuk program kerja jangka panjang oleh pemerintah kabupaten Alor dengan pihak WWF untuk merancang sebuah kawasan pesisir yang mampu dijadikan sebagai objek dan potensi pariwisata yang dituangkan dalam kebijakan KKPD (kawasan konservasi perairan daerah) yang dimulai sejak tahun juni 2013. Melalui kesepakatan ini, diharapkan adanya upaya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan serta ekosistemnya untuk menjamin keberadaan dan kesinambungan sumberdaya pesisir dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman hayati. Dimana hal ini akan bertujuan untuk pemanfaatan, perlindungan, pelestarian, serta terjaminnya ekosistem yang berkesinambungan. Hal tersebut dilakukan karena sumberdaya pesisir baik flora, fauna, dan ekosistem memiliki kegunaan dan nilai ekologis, ekonomis dan sosial yang penting.

Hal ini memang menjadi program – program utama organisasi WWF dalam melakukan upaya perlindungan alam dengan menjaga keseimbangan ekosistem perairan khususnya daerah pantai termasuk di Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur (NTT). Termasuk di dalamnya Pantai Sebanjar namun kemaksimalan program konservasi ini perlu ditelaah lebih dalam memberikan kontribusi terhadap pengembangan pariwisata di pantai Sebanjar Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur (NTT). Sehingga nanti dapat diketahui sejauh mana keberhasilan program kerjasama ini untuk pembangunan pariwisata kedepannya.

B. Batasan Masalah

Kerjasama konservasi perairan di pulau Alor dimulai sejak ditandatanganinya nota kesepakatan pengelolaan sumber daya alam di pesisir dan laut pada tiga juni 2013. Oleh karena itu penulis membuat batasan masalah sejak diberlakukannya nota kesepakatan tersebut yakni pada tahun 2013 hingga 2017.

C. Rumusan Masalah

Bagaimana program konservasi pesisir WWF-Indonesia berkontribusi terhadap pengembangan pariwisata berkelanjutan di pantai Sebanjar?

D. Tujuan dan kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

Untuk mengetahui Bagaimana program konservasi pesisir WWF-Indonesia berkontribusi terhadap pengembangan pariwisata berkelanjutan di pantai Sebanjar.

2. Kegunaan Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah

- a. Mengetahui Bagaimana program konservasi pesisir WWF-Indonesia berkontribusi terhadap pengembangan pariwisata berkelanjutan di pantai Sebanjar
- b. Menambah pembendaharaan referensi di Perpustakaan Program Studi Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Bosowa Makassar

E. Kerangka Konseptual

a. Pariwisata Berkelanjutan

Pariwisata berkelanjutan atau *sustainable tourism* adalah sebuah konsep turunan dari konsep pembangunan berkelanjutan yang ada pada laporan World Commission on Environment and Development, berjudul *Our Common Future* (atau lebih dikenal dengan *the Brundtland Report*) yang diserahkan ke lembaga PBB pada tahun 1987 (Mowforth dan Munt 1998). Pembangunan berkelanjutan merupakan suatu proses pembangunan yang berusaha untuk memenuhi kebutuhan sekarang dan selanjutnya diwariskan kepada generasi mendatang.

Singkat kata, dengan pembangunan berkelanjutan generasi sekarang dan generasi yang akan datang mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk menikmati alam beserta isinya. Sedangkan pariwisata berkelanjutan sendiri adalah sebuah proses dan sistem pembangunan pariwisata yang dapat menjamin keberlangsungan atau keberadaan sumber daya alam, kehidupan sosial-budaya dan ekonomi hingga generasi yang akan datang. Intinya, pariwisata berkelanjutan adalah pariwisata yang dapat memberikan manfaat jangka panjang kepada perekonomian lokal tanpa merusak lingkungan. Salah satu mekanisme dari pariwisata berkelanjutan adalah ekowisata yang merupakan perpaduan antara konservasi dan pariwisata, yaitu pendapatan yang diperoleh dari pariwisata seharusnya dikembalikan untuk kawasan yang perlu dilindungi untuk pelestarian dan peningkatan kondisi social ekonomi masyarakat di sekitarnya.

Ekowisata menurut International Ecotourism Society adalah perjalanan yang bertanggung jawab ke tempat-tempat yang alami dengan menjaga kelestarian lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Munculnya istilah responsible tourism atau pariwisata yang bertanggung jawab seakan ingin melengkapi konsep-konsep terdahulu. Definisi pariwisata berkelanjutan menurut sebagian orang agak sulit dipahami maksud dan operasionalisasinya secara langsung, sedangkan definisi ekowisata cenderung mengarah hanya kepada wisata berbasis alam terutama kawasan yang dilindungi Modul Pariwisata Berkelanjutan 41 seperti taman nasional dan cagar alam.

Tujuan yang ingin dicapai oleh responsible tourism sesungguhnya sama dengan kedua konsep sebelumnya yaitu pariwisata yang berusaha meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat. Tetapi responsible tourism lebih menekankan pilihan yang diambil oleh konsumen dalam menentukan tujuan wisata, akomodasi, model transportasi dan cara melakukan perjalanan, misalnya memilih mengatur sendiri perjalanannya dibandingkan mengikuti kelompok tur Responsible tourism juga menekankan kesadaran wisatawan itu sendiri untuk meminimalkan dampak-dampak negatif dari kunjungannya ke suatu tempat²

² <https://rinakurniawati.files.wordpress.com/2013/01/modul-pariwisata-berkelanjutan.pdf>.
Hal.40

b. Organisasi Internasional

Definisi Organisasi Internasional menurut Teuku May Rudy dalam bukunya :

“Administrasi dan Organisasi Internasional”

menegaskan bahwa :Organisasi Internasional adalah pola kajian kerjasama yang melintasi batas - batas Negara dengan didasari struktur organisasi yang jelas dan lengkap serta diharapkan atau diproyeksikan untuk berlangsung serta melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan - tujuan yang diperlukan serta disepakati bersama, baik antara pemerintah dengan pemerintah maupun antar sesama kelompok non pemerintah pada Negara yang berbeda.

dalam bukunya : menegaskan bahwa peran Organisasi Internasional adalah sebagai berikut : Wadah atau forum untuk menggalang kerjasama serta untuk mengurangi intensitas konflik antar sesama anggota.

1. Sebagai sarana perundingan untuk menghasilkan keputusan bersama yang saling menguntungkan dan ada kalanya bertindak sebagai
2. Lembaga yang mandiri untuk melaksanakan kegiatan yang diperlukan (antara lain kegiatan social kemanusiaan, bantuan untuk pelestarian lingkungan hidup, pemugaran monumen bersejarah, *peace keeping*, operation, dan lain - lain).

Sedangkan fungsi Organisasi Internasional menurut T. May Rudy adalah

1. Tempat berhimpun bagi Negara – Negara anggota bila Organisasi Internasional itu IGO (antar Negara/Pemerintah) dan bagi kelompok masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat apabila Organisasi Internasional masuk kategori INGO (Non Pemerintah)
2. Untuk menyusun atau merumuskan agenda bersama (yang menyangkut kepentingan semua anggota) dan memprakarsai berlangsungnya perundingan untuk menghasilkan perjanjian – perjanjian Internasional.
3. Untuk menyusun dan menghasilkan kesepakatan mengenai aturan/norma atau rezim – rezim Internasional.
4. Penyediaan saluran untuk berkomunikasi di antara sesama anggota dan ada kalanya merintis akses komunikasi bersama dengan non anggota bisa dengan negara lain yang bukan Negara anggota dan bisa dengan Organisasi Internasional lainnya
5. Penyebarluasan informasi yang bisa dimanfaatkan sesama anggota.³

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe Penelitian yang akan di pakai dalam penulisan ini adalah deskriptif. Yang dinilai akan dapat menjelaskan Bagaimana program konservasi pesisir WWF-Indonesia berkontribusi terhadap pengembangan pariwisata berkelanjutan di pantai Sebanjar.

1. Jenis dan Sumber Data

³ T. May Rudy, *Administrasi dan Organisasi Internasional*, Bandung, Refika Aditama, 2005, hal 27-28

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan jenis data primer. Data primer adalah data yang berasal dari pengumpulan data melalui penelusuran dari berbagai, data olahan hasil-hasil penelitian (jurnal) sebelumnya yang diterbitkan oleh lembaga terkait, wawancara dengan pihak – pihak terkait dan sumber-sumber lain yang relevan.

1. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian lapangan dengan cara mengumpulkan data dari sejumlah organisasi yang berhubungan atau menjadi pendukung kerjasama WWF - Indonesia dalam pengelolaan sumber daya alam dan pesisir terhadap aspek pariwisata di pulau Alor, khususnya pantai Sebanjar Adapun tempat yang penulis kunjungi dalam pengumpulan data ini adalah :

- a. Dinas Pariwisata Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).
- b. Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).
- c. WWF – Indonesia Kabupaten Alor Nusa Tenggara Timur (NTT)

2. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data yang penulis akan gunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisa kualitatif, dimana persoalan digambarkan berdasarkan fakta-fakta yang ada.

1. Rancangan dan Sistematika Pembahasan

Hasil penelitian dan analisa penelitian ini akan di susun dalam karya tulis ilmiah (skripsi), dalam rancangan sistematika sebagai berikut :

1. Bab pertama yaitu pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika pembahasan.
2. Bab kedua, tinjauan pustaka, berisi penelusuran dan literature tentang konsep
3. Bab ketiga, gambaran umum obyek penelitian, berisi profil tentang pulau Alor dan Pantai Sebanjar
4. Bab keempat, yaitu analisis penelitian berisi Bagaimana efektivitas kerjasama WWF - Indonesia dalam pengelolaan sumber daya alam dan pesisir terhadap aspek pariwisata di pulau Alor, khususnya pantai Sebanjar Apa saja dampak yang ditimbulkan kerjasama WWF - Indonesia dalam pengelolaan sumber daya alam dan pesisir terhadap aspek pariwisata di pulau Alor ?
5. Bab kelima, yaitu penutup berisi kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pariwisata Berkelanjutan

Pembangunan pariwisata berkelanjutan, seperti disebutkan dalam Piagam Pariwisata Berkelanjutan, adalah pembangunan yang dapat didukung secara ekologis sekaligus layak secara ekonomi, juga adil secara etika dan sosial terhadap masyarakat. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya terpadu dan terorganisasi untuk mengembangkan kualitas hidup dengan cara mengatur penyediaan, pengembangan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sumber daya secara berkelanjutan.

Hal tersebut hanya dapat terlaksana dengan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) yang melibatkan partisipasi aktif dan seimbang antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Dengan demikian, pembangunan berkelanjutan tidak saja terkait dengan isu-isu lingkungan, tetapi juga isu demokrasi, hak asasi manusia, dan isu lain yang lebih luas. Tak dapat dipungkiri, hingga saat ini konsep pembangunan berkelanjutan tersebut dianggap sebagai “resep” pembangunan terbaik, termasuk pembangunan pariwisata.⁴

⁴Rina, Kurniawati. 2010. “Modul Pariwisata Berkelanjutan”.Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota, Vol.14 No.3. Hal 57

A.1. Prinsip – Prinsip Pariwisata Berkelanjutan

Setidaknya dalam pembangunan pariwisata berkelanjutan yang akan di terapkan dalam pembangunan pariwisata berkelanjutan di pantai sebanjar Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) terdapat 8 poin yang harus dipenuhi secara prinsipil yaitu⁵ :

1. Penduduk suatu masyarakat dipersyaratkan untuk mampu mengendalikan atau mengontrol pembangunan pariwisata melalui keterlibatannya Secara langsung dalam penyusunan visi masyarakat pariwisata.

Menemu kembali sumberdaya untuk di pelihara dan di lestarikan.

Menetapkan sasaran dan strategi baik untuk pembangunan maupun management pariwisata.

Lebih dari itu penduduk suatu masyarakat juga di persyaratkan berperan dalam pelaksanaan atau implementasi daripada strategi yang telah di tetapkan, demikian juga dalam pengurusan operasional daripada sasaran (infrastruktur), pelayanan dan fasilitas pariwisata.

Suatu prakarsa (Initiative), pariwisata di kembangkan atas dasar input (masukan – masukan) yang mewakili aneka ragam kepentingan stakeholder.

2. Pembangunan pariwisata (dalam bentuk apapun) di persyaratkan menciptakan lapangan kerja yang bermutu (quality employment). Adapun

⁵ Cri Murthi Adi, *Prinsip – Prinsip Pembangunan Berkelanjutan*, Caretourism Vo1 issue (2), June, 2016. Hal 15

pemenuhan terciptanya lapangan kerja bermutu sebagaimana di maksud merupakan bagian integral dari pembangunan pariwisata.

Bagian dari proses keberhasilan mencapai lapangan kerja bermutu tersebut adalah upaya untuk menjamin bahwasannya sebanyak mungkin sarana pariwisata (*tourism infrastructure*) seperti Hotel, Restaurant, Toko dan lain-lain, mampu di kembangkan dan di kelola oleh penduduk lokal (*setempat*).

Pengalaman selama ini secara nyata membuktikan betapa pentingnya penyediaan pendidikan dan pelatihan bagi penduduk setempat, dimana hal ini dapat memperlancar timbulnya akses menuju kemandirian membiayai usaha lokal demikian juga entrepreneurs setempat, upaya tersebut adalah titik sentral dari kebijakan pariwisata yang berfokus pada lapangan kerja bermutu, distribusi secara meluas daripada maanfaat pariwisata terjadi pada tingkat destinasi parriwwisata hubungan antar usaha lokal peran serta penduduksetempat dalam perencanaan, pembangunan dan pengoperasian sumber daya dan pelayanan pariwisata sangat membantu bahkan menjamin bahwasannya distribusi manfaat pariwisata yang lebih adil dan berimbang akan mampu dilaksanakan antara penduduk setempat, pengunjung (*wisataawan*) dan penyedia pelayanan (*service provider*).

3. Pembangunan pariwisata berkelanjutan dipersyaratkan mampu mewujudkan kesetaraan antara generasi. Pembagian setara atau seadil mungkin daripada cost and benefit pembangunan pariwisata dipersyaratkan terjadi antara generasi masa kini dan generasi mendatang

atau penerus, Untuk berlaku lebih adil terhadap generasi mendatang dari para wisatawan dan industri perjalanan masyarakat harus memperjuangkan upaya untuk mewariskan basis sumberdaya yang setara dengan jatah yang di warisinya dan dengan demikian maka pariwisata berkelanjutan mampu menghindari semua pengatur-an alokasi basis sumberdaya yang bertentangan dengan persyaratan yang telah di tetapkan.

Wawasan melihat jauh kedepan merupakan persyaratan bagi organisasi bisnismaupun organisasi pengelolaan destinasi pariwisata untuk menjamin bahwasannya pembangunan destinasi tidak di manfaatkan untuk meraih keuntungan jangka pendek halmana berakibat pada ditinggalkannya destinasi hanya karena selera wisatawan maupun kepentingan bisnis telah berubah sehingga secara leluasa menentukan pilihan pada destinasi lain.

Wawasan melihat jauh kedepan mendorong diterakannya strategi proaktif yang pada gilirannya menjamin terwujudnya pembangunan destinasi secara berkelanjutan, demikian juga pengukuhan hubungan antar pelaku usaha maupun pemangku kepentingan lokal sepanjang masa.

4. Dipersyaratkan adanya keserasian antara kebutuhan wisatawan, tempat dan masyarakat, hal mana di mudahkan oleh dukungan para pemangku kepentingan secara meluas yang mengarah pada keseimbangan yang layak dan sesuai antara kepentingan tujuan – tujuan ekonomi, sosial, budaya dan kemanusiaan, dan lebih dari itu adanya pengakuan terhadap pentingnya kerja sama antar pemerintah, masyarakat sebagai tuan rumah, demikian

pula industri pariwisata, lembaga – lembaga komersil yang terlibat dalam pembinaan masyarakat dan perlindungan pelestarian lingkungan hidup.

Strategi perencanaan pariwisata harus di kaitkan dengan perangkat prakarsa yang lebih luas dan perencanaan pembangunan ekonomi.

5. Dipersyaratkan adanya kordinasi yang lebih erat pada tingkat kebijaksanaan dan pelaksanaan antara berbagai perwakilan pariwisata yang terlibat dan antara pemerintah pada tingkat – tingkat yang berbeda. Hal termaksud sangat relevan khususnya bila menyangkut kebijaksanaan pariwisata dan lingkungan hidup, penyediaan sarana seperti transportasi, parkir dan kapasitas air dan limbah perlu di pertimbangkan dalam kaitan dengan perencanaan dan pembangunan pariwisata. Kerjasama antara operator atraksi, business dan pariwisata adalah sangat esential khususnya mengingat bahwasannya kinerja satu usaha maupun operasi dapat dipengaruhi secara langsung oleh kinerja atau mutu usaha lain.
6. Dirasakan sangat perlu adanya penilaian terhadap dampak dari setiap proposal pembangunan pariwisata, kapasitas site perlu di pertimbangkan termasuk ambang batas fisik, alam, sosial dan kebudayaan dan bahwasannya pembangunan pariwisata harus compatible dengan ambang batas lokal dan lingkungan, rencana dan pelaksanaan perlu di evaluasi secara reguler dengan penyesuaian – penyesuaian sebagaimana di perlukan.

Pedoman – pedoman perlu ditetapkan untuk operasi dibidang pariwisata termasuk persyaratan tentang penilaian dampak. Juga di

persyaratkan penetapan code of practice yang berlaku bagi pariwisata pada semua tingkat, nasional, regional, dan lokal. Selain daripada itu juga di sarankan perlu untuk menetapkan indikator – indikator dan ambang batas untuk mengukur dampak maupun keberhasilan daripada usaha pariwisata lokal, pengutamaan strategi perlindungan dan pengawasan dirasakan sangat penting apabila masyarakat dipersyaratkan melindungi sumberdaya, yang sebagaimana di maklumi, merupakan dasar dari produk wisata.

7. Perencanaan pariwisata harus mengalihkan pilihan penerapan model tradisional dengan fokus pada pertumbuhan dan menerapkan sebagai gantinya model yang berfokus pada peluang – peluang lapangan kerja, pendapatan dan peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat setempat, sekaligus menjamin bahwasannya semua keputusan yang menyangkut pembangunan mencerminkan nilai sepenuhnya daripada lingkungan alam dan lingkungan budaya. Pengelolaan dan pemakaian saran publik seperti air, udara dan tanah adat harus disertai dengan tanggung jawab atas nama pemakai sebagai jaminan bahwa sumberdaya tidak akan di cemarkan.

Pembangunan pariwisata berkelanjutan mempersyaratkan diadakannya program – program pendidikan dan latihan untuk memperbaiki pemahaman publik, sekaligus meningkatkan business, keterampilan kejuruan dan profesional.

8. Pembangunan pariwisata berkelanjutan mempersyaratkan terlaksananya upaya – upaya untuk mempromosikan cara – cara pemakaian yang sesuai

dan aktivitas yang besumber pada sekaligus memperkuat karakter lanskap, rasa hormat pada tempat indentitas atau citra masyarakat setempat, semua aktivitas dan cara – cara pemakaian sebagaimana dimaksud harus mampu menjamin terwujudnya pengalaman pariwisata yang bermutu yang memuaskan pariwisata.

Skala maupun ragam fasilitas pariwisata harus mampu mencerminkan toleransi ambang batas yang dapat diterima sumberdaya pariwisata fasilitas skala kecil dan berdampak rendah harus di picu pembangunannya melalui pemberian insentif dan cara pembayaran yang sesuai.⁶

A.2. Pariwisata Berkelanjutan Menurut organisasi UNWTO

Menurut organisasi *UNWTO(United Nations World Tourism Organisation)* Pembangunan pariwisata berkelanjutan, seperti disebutkan dalam Piagam Pariwisata Berkelanjutan, adalah pembangunan yang dapat didukung secara ekologis sekaligus layak secara ekonomi, juga adil secara etika dan sosial terhadap masyarakat. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya terpadu dan terorganisasi untuk mengembangkan kualitas hidup dengan cara mengatur penyediaan, pengembangan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sumber daya secara berkelanjutan.

Hal tersebut hanya dapat terlaksana dengan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) yang melibatkan partisipasi aktif dan seimbang antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Dengan demikian, pembangunan berkelanjutan tidak saja terkait dengan isu-isu

⁶Ibid hal. 76

lingkungan, tetapi juga isu demokrasi, hak asasi manusia, dan isu lain yang lebih luas. Tak dapat dipungkiri, hingga saat ini konsep pembangunan berkelanjutan tersebut dianggap sebagai “resep” pembangunan terbaik, termasuk pembangunan pariwisata.

Meskipun memberikan manfaat yang besar bagi perkembangan kesejahteraan masyarakat di dunia, pembangunan pariwisata juga sering disebut sebagai salah satu sumber kerusakan lingkungan utama, ketika pembangunan pariwisata tersebut membutuhkan penyediaan infrastruktur yang harus merusak alam sebagaimana yang disebutkan dalam laporan *World Tourism Organization* tahun 1996. Banyak kasus di beberapa daerah, pembangunan resort dan hotel harus menghancurkan pantai, laut, hutan dan berbagai ekosistem lainnya yang sudah ada dan tumbuh sebelumnya. Keramaian wisatawan juga memberikan dampak perubahan perilaku binatang yang ditunjukkan dengan tingkah agresif yang seringkali membahayakan. Munculnya kawasan kumuh juga menjadi dampak negatif lainnya yang ditimbulkan oleh pariwisata selain masalah perubahan nilai –nilai budaya lokal akibat masuknya budaya asing.⁷

⁷Pariwisata berkelanjutan Menurut UNWTO. Diakses dari :
http://www.academia.edu/9402382/TANTANGAN_SUMBER_DAYA_MANUSIA_PARIWISATA_TERHADAP_PENGEMBANGAN_PARIWISATA_BERKELANJUTAN_SUSTAINABLE_TOURISM_DEVELOPMENT_DI_BALI_ANALISIS_KRITIS_TERHADAP_KASUS_RUMAH_MAKAN_HALAL_DI_KAWASAN_ANYER pada tanggal 10 April 2018

A.3. Pariwisata Berkelanjutan Menurut Richard Sharpley

Peneliti pariwisata seperti Richard Sharpley, disibukkan dengan menentukan indikator indikator turunan dari sustainable tourism. Konsep Pariwisata berkelanjutan malah terlihat sepeprti slogan, alat pemasaran dan perangkat promosi. Pariwisata berkelanjutan terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Pariwisata berkelanjutan memberikan banyak kriteria yang sulit untuk dicapai bagi satu tujuan wisata. Apalagi untuk pariwisata Indonesia yang dikelola oleh masyarakat. Siapa yang mengelola pasti akan mempengaruhi kecenderungan di sisi mana pariwisata akan dibawa.

Menurut Sharpley, Pariwisata berkelanjutan adalah interpretasi pariwisata yang akan tampil dengan lebih dinamis dengan ciri - ciri pertumbuhan, globalisasi, integrasi, *the dialogue between cultures*, multidisiplin, sensitivitas dan daya pulih yang merupakan intisari prinsip *Global Code of Ethics for Tourism*. Karena itu kepariwisataan tidak hanya dilihat sebagai salah satu aktivitas ekonomi, melainkan sebagai sebuah wahana penting untuk pembangunan individu dan manusia. Definisi pembangunan pariwisata berkelanjutan dapat memiliki makna beragam. Orang dari banyak bidang yang berbeda menggunakan istilah berbeda di dalam konteks yang berbeda dan mereka mempunyai konsep, bias, dan pendekatan berbeda pula.

Dalam membahas pariwisata berkelanjutan di pantai sepanjang Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), penulis mengambil konsep pariwisata menurut UNWTO yang dimana pariwisata berkelanjutan di sebutkan sebagai pembangunan pariwisata yang didukung secara ekologis sekaligus layak secara

ekonomi dan etika sosial terhadap masyarakat di kawasan pantai sepanjang Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan sebuah kawasan yang ingin dijadikan sebagai suatu objek pendorong pariwisata yang akan membangun kota dari aspek pariwisata tetapi tetap memperhatikan dampak lingkungan sekitar pantai, salah satu upaya serius dalam memperhatikan dampak lingkungan akibat pembangunan pariwisata adalah membangun kerjasama antara pihak stake holder (pemerintah setempat) dengan organisasi WWF-Indonesiamelalui program konservasi.⁸

6. Organisasi Internasional

Hubungan internasional berawal dari kontak dan interaksi di antara negara-negara di dunia, terutama dalam masalah politik. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, isu-isu internasional mengalami perkembangan. Negara ataupun aktor non-negara mulai menunjukkan ketertarikannya akan isu-isu internasional di luar isu politik, seperti isu ekonomi, lingkungan hidup, sosial dan kebudayaan.

Istilah hubungan internasional memiliki keterkaitan erat dengan semua bentuk interaksi di antara masyarakat dari setiap negara, baik oleh pemerintah atau rakyat dari negara yang bersangkutan. Dalam mengkaji ilmu hubungan internasional, yang juga meliputi kajian ilmu politik luar negeri atau politik internasional, serta semua segi hubungan di antara negara-negara di dunia, juga meliputi kajian terhadap lembaga perdagangan internasional, pariwisata,

⁸Pariwisata Berkelanjutan Menurut Richard Sharpley dari :
<http://www.kabarindonesia.com/berita.php?pil=20&jd=Menata+Ulang+Pariwisata+Berkelanjutan+Untuk+Indonesia&dn=2016110920200Pa> Pada Tanggal 12 April 2018

perdagangan internasional, transportasi, komunikasi dan perkembangan nilai-nilai dan etika internasional.

Dala, Hubungan Internasional terdapat paya mendefinisikan organisasi internasional harus melihat pada tujuan yang hendak dicapai, institusi-institusi yang ada, suatu proses perkiraan peraturan-peraturan yang dibuat pemerintah terhadap hubungan suatu negara dengan aktor-aktor non-negara⁹. Sehingga, dengan demikian, organisasi internasional dapat didefinisikan sebagai sebuah struktur formal yang berkesinambungan, yang pembentukannya didasarkan pada perjanjian antar anggota-anggotanya dari dua atau lebih negara berdaulat untuk mencapai tujuan bersama dari paraanggotanya¹⁰. Definisi lain dari organisasi internasional adalah suatu polakerjasama yang melintasi batas-batas negara, dengan didasari pada struktur organisasi yang jelas, yang diharapkan dapat berfungsi secara berkesinambungan dan melembaga dalam usaha untuk mencapai tujuan - tujuan yang diperlukan serta yang disepakati bersama, baik antara pemerintah dengan pemerintah maupun antar sesama kelompok nonpemerintah pada negara yang berbeda.

dalam bukunya : menegaskan bahwa peran Organisasi Internasional adalah sebagai berikut : Wadah atau forum untuk menggalang kerjasama serta untuk mengurangi intensitas konflik antar sesama anggota.

1. Sebagai sarana perundingan untuk menghasilkan keputusan bersama yang saling menguntungkan dan ada kalanya bertindak sebagai

⁹Soeprapto, R. 1997. *Hubungan Internasional: Sistem, Interaksi, dan Perilaku*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

¹⁰ Archer, Clive. 1992, "International Organization", Routledge. Chapter 1 definitions and history; Chapter 2 Classification of International Organizations

2. Lembaga yang mandiri untuk melaksanakan kegiatan yang diperlukan (antara lain kegiatan social kemanusiaan, bantuan untuk pelestarian lingkungan hidup, pemugaran monumen bersejarah, *peace keeping*, operation, dan lain - lain).

Sedangkan fungsi Organisasi Internasional menurut T. May Rudy adalah

1. Tempat berhimpun bagi Negara – Negara anggota bila Organisasi Internasional itu IGO (antar Negara/Pemerintah) dan bagi kelompok masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat apabila Organisasi Internasional masuk kategori INGO (Non Pemerintah)
2. Untuk menyusun atau merumuskan agenda bersama (yang menyangkut kepentingan semua anggota) dan memprakarsai berlangsungnya perundingan untuk menghasilkan perjanjian – perjanjian Internasional.
3. Untuk menyusun dan menghasilkan kesepakatan mengenai aturan/norma atau rezim – rezim Internasional.
4. Penyediaan saluran untuk berkomunikasi di antara sesama anggota dan ada kalanya merintis akses komunikasi bersama dengan non anggota bisa dengan negara lain yang bukan Negara anggota dan bisa dengan Organisasi Internasional lainnya
5. Penyebarluasan informasi yang bisa dimanfaatkan sesama anggota.¹¹

Selanjutnya mengenai aktivitas atau pun program yang dijalankan WWF. Aktivitas tersebut mencakup beberapa lingkup, antara lain: hutan, laut, perairan

¹¹ T. May Rudy, *Administrasi dan Organisasi Internasional*, Bandung, Refika Aditama, 2005, hal 27-28

tawar, kehidupan satwa liar, pangan, dan iklim Pertama adalah hutan, dalam hal ini WWF sangat berfokus dalam melakukan konservasi pada hutan-hutan paling penting keberadaannya di dunia. Dalam lingkup hutan, kinerja WWF kebanyakan dilakukan pada *rain forest*, seperti hutan hujan di Amazon, Lembah Kongo, Mekong, dan wilayah lainnya di dekat khatulistiwa, serta di daerah beriklim sedang, seperti Rusia Timur, hingga Amerika Serikat. kedua untuk laut sendiri WWF berusaha untuk menjaga kondisi laut agar tetap alami, melestarikan keanekaragaman hayati laut yang melimpah, dan juga terkait dengan mata pencaharian di laut agar selalu *sustainable*, sehingga dapat mendukung perekonomian Konsen WWF pada kehidupan Laut Arktik kemudian dapat dijadikan sebagai salah satu contoh terkait dengan aspek laut. Ketiga mengenai perairan tawar, yang mana aktivitas terkait bertujuan untuk menciptakan air yang aman untuk manusia dan alam Salah satu contoh nyatanya adalah upaya melindungi sungai-sungai utama di Amerika Selatan dan kerjasama yang dilakukan dengan lembaga di daerah tersebut, seperti universitas

Keempat adalah fokusnya pada kehidupan satwa liar, yang mana berusaha untuk melindungi spesies paling penting dan langka di dunia Salah satu upaya yang berhasil dilakukan terkait *wildlife* ini adalah pemulihan satwa liar, seperti badak hitam Afrika Selatan, hingga rusa jantan hitam di Himalaya. Kelima yakni mengenai pangan, yang mana tujuan aktivitas pada bidang ini adalah menjaga ketersediaan pangan serta meningkatkan efisiensi dalam produksi pangan, sehingga dapat meminimalkan makanan yang terbuang dan menyisapkan pasokan bahan pangan di masa depan Salah satu bentuk program WWF dalam hal ini

adalah dengan mendesain sebuah permainan yang disebut dengan *Food Chain Reaction* di Amerika dalam rangka membantu pemerintah dan lembaga lainnya, serta perusahaan yang mungkin berinteraksi selama krisis pangan global di masa depan. Keenam mengenai iklim, aktivitasnya bertujuan untuk menciptakan *climate resilient, zero-carbon world*, serta penggunaan energi yang terbarukan. Contoh upaya yang dilakukan pada aspek ini adalah adanya suatu program khusus yang kemudian bertujuan mendorong jutaan warga Amerika, para *leading business* dan pemimpin dalam pemerintahan untuk dapat menyadari pentingnya menjaga ekosistem sehingga dapat menghindarkan dari perubahan iklim yang lebih buruk.

Hubungan-hubungan dan juga interaksi-interaksi antar trans negara yang bersifat internasional biasanya cenderung lebih mengutamakan aktor-aktor negara dan mengabaikan aktor-aktor non negara. Hal ini dikarenakan bahwa aktor-aktor negara memiliki keinginan untuk dapat melindungi kedaulatan negaranya sendiri didalam aspek interaksi antar negara agar kebijakan-kebijakan dan juga keputusan-keputusan yang akan diambil selanjutnya tidak akan dapat dipengaruhi oleh aktor-aktor non negara. Kehadiran International Non-Governmental Organization atau INGO ini kemudian membuka akses yang lebih luas bagi aktor-aktor dalam hubungan internasional terutamanya aktor-aktor yang bersifat non negara untuk dapat lebih memiliki peran dan dapat terlibat lebih jauh didalam hubungan dan juga interaksi internasional didalam aspek apapun seperti aspek politik, sosial, keamanan, ekonomi, lingkungan, hak asasi manusia dan lain sebagainya. INGO yang menjadi sebuah organisasi yang independen didalam

pembentukannya INGO selain bertindak sebagai ‘teman’ aktor negara didalam membantu penyelesaian terhadap isu-isu tertentu, pada kenyataannya INGO juga mampu menjadi lawan yang memiliki pandangan yang berseberangan terhadap aktor negara. Seperti contohnya, INGO yang memiliki fokus terhadap permasalahan Hak Asasi Manusia sering menjadi organisasi yang berseberangan dengan pemerintahan negara karena menganggap bahwa pemerintahan didalam negara tersebut tidak mampu untuk melindungi Hak Asasi Manusia yang dimiliki oleh warga negaranya karena warga negaranya cenderung sering mengalami eksploitasi dan juga konflik yang mengancam Hak Asasi Manusia mereka.



BOSOWA

BAB III

GAMBARAN UMUM

A. BLUE PRINT PENGELOLAAN WISATA KABUPATEN ALOR

➤ Pantai Sebanjar



(sumber:www.google.com)

Salah satu tujuan wisata favorit di Alor adalah Pantai Sebanjar yang berada di Kecamatan Sebanjar, hanya beberapa kilometer setelah Kecamatan Alor Kecil. Menuju ke Pantai Sebanjar, pengunjung dapat menggunakan

kendaraan umum atau menumpang angkutan umum (Bemo) yang berwarna biru dengan tarif yang lumayan murah.



(sumber:www.google.com)

Pantai ini memiliki pasir yang sangat bersih dan berwarna merah mudah karena bercampur dengan karang yang telah hancur. Dari pantai ini, pengunjung juga bisa melihat pulau lain di depannya dan pemandangan di sepanjang jalan menuju ke sini juga indah, seperti pulau Pura, Pulau Pantar, Pulau Ternate dan Pulau Buaya. Untuk mengunjungi pantai Sebanjar, dapat melewati pantai-pantai lain di sebelah kiri jalan dan juga tebing-tebing batu tinggi dengan pepohonan di atasnya di sisi kanan jalan. Di sepanjang jalan banyak rumah penduduk dan juga rumah adat di Alor Kecil.¹²

B. Program konservasi pesisir WWF – Indonesia di pantai sebanjar

a. Profil pantai sebanjar

Keadaan Alam Pantai Sebanjar Topografi dan Klimatologi Karakteristik lanskap kawasan pantai Sebanjar sangat unik karena mempunyai tiga karakteristik utama yaitu pantai landai, dataran rendah dan kawasan perbukitan. Ketiganya terintegrasi menjadi satu membentuk kawasan pantai yang menarik. Kondisi topografi cukup bervariasi yaitu sebagian berupa dataran rendah dan sebagiannya lagi kondisinya berbukit. Kondisi iklim mikro di Desa Alor Besar khususnya kawasan Pantai Sebanjar ini termasuk iklim pantai yang panas dengan suhu harian rata-rata mencapai 29o C. Curah Hujan Pantai Sebanjar yang berada di Desa Alor

¹² Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Alor, 2010. Draft Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata Kabupaten Alor Tahun 2010-2020. Dinas Kebudayaan dan Parwisata Kabupaten Alor. Kalabahi.

Besar memiliki hari curah hujan dan hujan yang sangat rendah, jumlah bulan basah kurang dari 4 bulan dan memiliki 8 bulan kering pertahun.

Curah hujan rata-rata terjadi antara Bulan Desember sampai dengan Bulan Maret sehingga antara bulan inilah kegiatan pertanian dan perkebunan dapat dilakukan sedangkan delapan bulan (Bulan April – Nopember) yang dinyatakan relative kering. Kemiringan dan Jenis Tanah Pantai Sebanjar berada di daerah pesisir pantai dengan elevasi dataran rata-rata 0 – 2 m dari permukaan air laut, sedangkan bagian kawasan perbukitan mencapai 25 m hingga > 40 m dari permukaan air laut. Kemiringan tanah juga beragam, mulai dengan kemiringan 0 – 2 % hingga lebih dari 40% di Desa Alor Besar. Struktur tanah di Kabupaten Alor pada umumnya termasuk kategori vulkanik muda, dengan solum tanah sedang sampai tinggi sehingga sangat subur karena mengandung unsur hara makro dalam jumlah yang sangat banyak, namun tanah yang gembur telah menyebabkan kondisi tanah yang labil sehingga memerlukan pemanfaatan/pengelolaan lahan yang sesuai (RPJMD Kab. Alor tahun 2010-2014). Sedangkan di Desa Alor Besar sendiri struktur tanah lempung debu berpasir dan sebagian wilayah yang berada di perbukitan termasuk kategori vulkanik muda

Pantai Sebanjar terletak di Desa Alor Besar yang berjarak sekitar kurang lebih 20 Km dari Kota Kalabahi-ibukota Kabupaten Alor. Untuk mencapai objek wisata ini, pengunjung dapat menggunakan kendaraan roda 2 dan roda 4 dengan waktu tempuh sekitar 30 menit. Pantai Sebanjar memiliki keunikan dengan keindahan pantai pasir putih dan air laut yang bersih, serta memiliki terumbu karang yang unik dan menawan. Pantai Sebanjar juga menyediakan fasilitas bagi

pengunjung untuk berteduh berupa musholah, tempat parkir, rumah payung dan mandi cuci kakus (MCK). Selain itu telah tersedia fasilitas penunjang lainnya seperti home stay di lokasi Pantai Sebanjar, namun belum dimanfaatkan dengan baik. Daya dukung sebuah kawasan wisata didefinisikannya sebagai level kehadiran wisatawan yang menimbulkan dampak pada masyarakat setempat, lingkungan, dan ekonomi yang masih dapat ditoleransi baik oleh masyarakat maupun wisatawan itu sendiri dan memberikan jaminan sustainability pada masa mendatang. Cooper et al (1993: 95) lebih memberi tekanan pada kehadiran wisatawan dari pada jumlah wisatawan karena menurutnya level kehadiran lebih tepat dipakai sebagai pendekatan bagi sejumlah faktor seperti lama tinggal (length of stay), karakteristik wisatawan, konsentrasi wisatawan pada lokasi geografis tertentu dan derajat musiman kunjungan wisatawan.

b. Profil WWF – Indonesia

WWF-Indonesia merupakan yayasan independen yang terdaftar sesuai hukum Indonesia. Dikelola oleh Dewan Penyantun yang terdiri dari Dewan Penasihat, Dewan Pengawas dan Dewan Pelaksana. Dewan ini berfungsi sebagai lembaga penentu arahan strategis dan kredibilitas WWF-Indonesia. Para anggota dewan berbagi tanggung jawab secara kelembagaan melalui komite operasional. Dua komite yang sedang dalam tahap pengembangan adalah Komite Pendanaan dan Investasi serta Komite Program.

Kantor Sekretariat Nasional WWF-Indonesia berada di Jakarta. Perannya memimpin dan berkoordinasi dengan 24 kantor WWF-Indonesia yang tersebar di seluruh negeri. Kantor Sekretariat mengembangkan kebijakan dan prioritas,

membantu pertukaran pembelajaran antar kantor, melakukan koordinasi untuk kampanye nasional, memberikan bantuan teknis dan pengembangan kapasitas, serta memberikan dukungan agar kegiatan ditingkat nasional berjalan dengan lancar. Kantor Sekretariat Nasional juga menjaga agar upaya WWF-Indonesia selaras dengan Global WWF Network.

WWF-Indonesia memiliki sejumlah kantor lapangan (*Field Office*). Dua dari Kantor lapangan ini, melakukan koordinasi untuk kegiatan dan program di lokasi konservasi. Kantor Lapangan Jayapura merupakan kantor terbesar yang ada dipimpin oleh Benja Mambai Kantor ini mengkoordinasi seluruh kegiatan WWF-Indonesia di Papua dan Irian Jaya bagian Barat. Kantor Lapangan Mataram, melakukan koordinasi bagi kerja WWF-Indonesia di wilayah Nusa Tenggara. Kantor lapangan tersebut melakukan upaya pelestarian di tingkat lokal. Kami bekerja sama dengan pemerintah lokal, melalui kegiatan proyek praktis di lapangan, penelitian ilmiah, memberi masukan untuk kebijakan lingkungan, mempromosikan pendidikan lingkungan, memperkuat komunitas, dan meningkatkan kesadaran publik terhadap isu lingkungan.

WWF-Indonesia merupakan bagian independen dari jaringan dari WWF dan afiliasinya, organisasi pelestarian global yang bekerja di 100 negara di dunia. Untuk informasi lebih lanjut tentang visi global, sejarah dan keterlibatan kami selama ini untuk mencapai mimpi pelestarian kami yaitu mewujudkan dunia dimana manusia dapat hidup selaras dengan alam.

c. Peran WWF di Pantai Sebanjar dalam Program Konservasi Pesisir

Pengelolaan habitat pesisir melalui pembentukan Kawasan Konservasi Perairan (KKP) bukanlah hal baru. Faktanya, di Indonesia, pemerintah telah membentuk KKP sekitar tiga dekade lalu dan jumlahnya terus bertambah dan bahkan Pemerintah Indonesia telah menargetkan untuk membangun KKP seluas 20 juta hektar pada tahun 2020. Sampai Desember 2016, terdapat 165 KKP dengan total luasan mencapai hampir 18 juta hektar yang tersebar di seluruh Nusantara. Seiring dengan perjalanan pembentukan dan pengelolaan KKP di Indonesia, banyak pembelajaran yang dapat dipetik dan diterapkan di lokasi lain agar pengelolaan KKP bisa menjadi lebih efektif dan efisien.

Saat ini, para ahli dan praktisi (Para Pemangku kepentingan atau stakeholder) sepakat bahwa KKP merupakan salah satu solusi terbaik untuk menekan ancaman terhadap ekosistem pesisir dan melindungi habitat penting untuk ikan memijah, tumbuh dan mencari makan, sehingga masyarakat sekitar KKP mendapatkan manfaat dari perikanan yang sehat. Manfaat lain dari KKP adalah untuk mengembangkan pariwisata bahari laut dari sumber daya laut yang terjaga sehingga bisa mendatangkan keuntungan ekonomi bagi masyarakat dan pemerintah lokal.

WWF-Indonesia telah bekerjasama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan berbagai mitra dalam beberapa dekade belakangan dalam upaya pembentukan dan meningkatkan efektivitas pengelolaan KKP di Indonesia. Kami mengimplementasikan strategi inovatif yang berlandaskan ilmu pengetahuan

termutakhir agar KKP yang dibentuk dan dikelola dapat memberikan manfaat ekologi, sosial dan ekonomi secara maksimal untuk masyarakat dan lingkungan.

Hal ini di tujukan untuk menjaga ekosistem dan lingkungan selain itu pemerintah diharapkan mampu menunjukkan kepeduliannya terhadap tata kelola lingkungan yang lebih baik, dikarenakan hal ini menjadi penentu masa depan kawasan pesisir yang lebih baik dari sebelumnya, program konservasi pesisir ini ditujukan atas dasar kepedulian terhadap ekosistem, ekologi lingkungan sekitar khususnya daeran pesisir pantai.

Dalam pengelolaan daerah pesisir pantai perlu ddilakukan kerjasama antar pihak WWF - Indonesia dengan pemerintah setempat (Kota atau Kabupaten), yang kemudian dapat diajak dalam rangka untuk bekerja sama memperhatikan suatu aspek lingkungan demi terciptanya kondisi lingkungan yang ideal untuk masa depan para generasi penerus.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Program Konservasi Pesisir WWF Indonesia

Adanya program KKPD yang dirancang oleh pemerintah Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur yang bekerja sama dengan salah satu organisasi Internasional yakni WWF (World Wild Fund) yang dimulai sejak periode juni 2013 hingga sekarang. Program yang ditujukan untuk pembangunan dan peningkatan sektor pariwisata ini diharapkan mampu mendorong perekonomian daerah yang nantinya akan dapat mengatasi masalah – masalah primer seperti pembangunan sumberdaya manusia, penuntasan kemiskinan di kawasan konservasi pesisir pantai Kabupaten Alor, dan pengembangan pariwisatanya diharapkan mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional.

Untuk itulah, pemerintah kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur mengadakan kerjasama dengan pihak luar yakni organisasi Internasional yang bergerak di bidang lingkungan yaitu WWF sebagai aktor yang akan memainkan peran penting dalam menunjang keberhasilan program Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) di Pantai Sebanjar.

7. Dalam Hal ini, peran WWF akan sangat vital atau penting untuk menentukan sejauh mana keberhasilan program pengembangan pariwisata berkelanjutan ini yang nantinya diukur melalui indikator capaian hasil program KKPD oleh pemerintah Kabupaten Alor Provinsi NTT. Untuk

itu WWF memainkan beberapa peran penting diantaranya adalah sebagai fasilitator dalam setiap usaha pengembangan dan penerapan pariwisata berkelanjutan pada program KKPD Kabupaten Alor di pantai Sebanjar, sebagai edukator atau pihak yang memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga ekosistem untuk pemanfaatan lingkungan kawasan konservasi, dan sebagai aktor yang membantu pemerintah dalam pengelolaan sumberdaya alam dan pemanfaatan potensi kawasan pesisir sebagai wujud pengembangan pariwisata berkelanjutan dalam program KKPD Alor.

A.1. Pemanfaatan Zonasi wilayah perairan

Mengacu pada penataan ruang sebagai salah satu kebijakan pengelolaan KKPD Kabupaten Alor, setelah tahapan penetapan kawasan dilakukan, maka zonasi KKPD Kabupaten Alor merupakan tahapan lanjutan yang perlu dilakukan adalah Penetapan zonasi KKPD Kabupaten Alor, berdasarkan kriteria kawasan yang diamanatkan oleh PER.30/MEN/2010 dan hasil kesepakatan penduduk setempat. Zonasi KKPD dibagi menjadi empat zona sebagai berikut:

1. **Zona inti** KKPD Kabupaten Alor merupakan wilayah perlindungan mutlak habitat dan populasi ikan, pelestarian, pemulihan dan area *recovery/Rehabiltasi* alami ekosistem beserta habitat dan populasi biota perairan laut dan pesisir pantai, Pada zona ini tidak diperkenankan adanya pengembangan fisik, dan membatasi dengan ketat berbagai macam

kegiatan kecuali dalam rangka pengamanan dan pemantauan kawasan serta penelitian (dengan izin khusus).¹³

2. **Zona perlindungan** merupakan bagian dari KKPD Kabupaten Alor yang karena letak, kondisi dan potensinyamampu mendukungkepentingan perbaikan/rehabilitasi, pelestarian pada zona inti dan zona pemanfaatan KKPD Alor Zona ini membatasi secara ketat berbagai macam kegiatan serta merupakan area rehabilitasi (*recovery*) secara alami, terutama untuk terumbu karang yang mengalami kerusakan dan dalam tahap perbaikan / *recovery*. Kegiatan yang diperbolehkan adalah wisata bahari (*snorkling*, penyelaman / *scuba diving*) dan perahu kaca untuk melihat keindahan bawah laut dan penelitian.
3. **Zona perikanan berkelanjutan** di KKPD Kabupaten Alor merupakan zona perlindungan habitat dan populasi ikan, zona pemanfaatan dan penangkapan ikan secara maksimal baik secara tradisional dan modern dengan tetap memperhatikan cara-cara pemanfaatan yang ramah lingkungan, untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari bagi masyarakat sekitarnya dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.
4. **Zona pemanfaatan pariwisata** merupakan bagian Kawasan konservasi Perairan Daerah Kabupaten Alor yang karena letak, kondisi dan potensi

¹³ Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: Per.30/Men/2010 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan. Kementerian Kelautan dan Perikanan. Jakarta.

alamnya dimanfaatkan untuk perlindungan dan pelestarian habitat dan populasi ikan, kepentingan pariwisata dan kondisi/jasa lingkungan lainnya, penelitian dan pengembangan serta pendidikan.

Dengan ditetapkannya zonasi konservasi di kawasan pesisir pantai sebanjar yang kemudin melarang warga atau nelayan melakukan penangkapan dikawasan konservasi. Yang mana masyarakat pesisir yang bermatapencaharian sebagai nelayan yang bergantung pada hasil laut, pemerintah tetap memberikan hak eksklusif perikanan uuntuk para nelayan, hal ini dilihat dari terbentuknya. Zona perikanan berkelanjutan di KKPD Kabupaten Alor yang mana merupakan zona perlindungan habitat dan populasi ikan, zona pemanfaatan dan penangkapan ikan tetap memperhatikan pola atau cara penangkapan, baik secara tradisional dan modern dengan tetap memperhatikan cara-cara pemanfaatan yang ramah lingkungan, untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari bagi masyarakat sekitarnya dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat, Dan dapat meningkatkan pendapatan ekonomi melalui perikanan.

A.2. Fasilitator Dalam Setiap Usaha Pengembangan Dan Penerapan Pariwisata Berkelanjutan

Dalam melakukan tugasnya sebagai fasilitator, organisasi Internasional WWF terlebih dahulu melakukan peninjauan berbagai lokasi yang ada guna untuk mempersiapkan segala sesuatu mengenai program KKPD kemudian melihat situasi dan kondisi kawasan konservasi pesisir yang tak lain adalah

Pantai Sebanjar Kabupaten Alor. Untuk itu WWF dengan matang mengusulkan rancangan strategi kepada pemerintah kabupaten Alor yang akan digunakan untuk menjalankan program tersebut. Peninjauan ini dilakukan secara serius mengingat hal ini atau program ini bersifat jangka panjang.

Pemantauan Biota Langka dan Eksotik

Biota langka dan eksotik memiliki area ruaya/migrasi yang sangat luas. Kondisi ini menyebabkan adanya kemungkinan biota-biota tersebut melintasi KKPD Kabupaten Alor, baik hanya untuk tinggal sementara dan/atau menjadikan kawasan sebagai jalur perlintasan migrasi biota tersebut. Pemantauan biota langka dan eksotik tersebut dapat dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dari para nelayan, wisatawan dan/atau hasil pengamatan dari nahkoda kapal yang melintasi kawasan tersebut.

Cara lain yang dapat dilakukan adalah pemantauan yang dilakukan secara bersamaan dengan kegiatan pemantauan pemijahan ikan dan pemantauan pola pemanfaatan sumberdaya perairan, metode pemantauan biota langka dan eksotik pada kawasan konservasi perairan daerah Kabupaten Alor menggunakan metode sebagaimana Protokol Pemantauan Insidental di Kabupaten Alor.¹⁴ Monitoring pengamatan insidental dilakukan karena beberapa alasan sebagai berikut:

1. Setasea dan duyung merupakan mamalia laut yang dilindungi dan bisa menjadi atraksi yang menarik untuk kegiatan pariwisata alam.

¹⁴ WWF, 2012. Panduan Pemantauan Pemijahan Ikan (*Spawning Aggregations* atau SPAGs) di Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) Kabupaten Alor. WWF. Kalabahi.

Pengetahuan terhadap jalur migrasi setasea dan duyung bisa menjadi informasi dasar untuk pengembangan wisata '*whale watching*'

2. Walaupun belum dilindungi secara hukum, binatang pari manta merupakan binatang yang '*excotic*' dan *flagship* yang akhir-akhir ini terancam mengalami kepunahan karena tekanan penangkapan yang berlebihan.

Adanya kebutuhan akan informasi mengenai ketahanan karang menghadapi ancaman pemutihan karang secara global. Kegiatan monitoring ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pemahaman tentang ketahanan dan ketangguhan karang di Kabupaten Alor.

Tujuan dari kegiatan monitoring pengamatan insidental adalah:

1. Memberikan informasi pada pihak pengelola dan masyarakat Kabupaten Alor, tentang pengaruh pengelolaan terhadap eksistensi jalur migrasi dari setasea, manta dan menjelaskan terjadinya bleaching dalam skala luas.
2. Membantu pengambil keputusan untuk mengevaluasi apakah pengelolaan telah berjalan efektif, khususnya perlindungan terhadap jalur migrasi setasea dan manta
3. Kegiatan monitoring ini juga bertujuan untuk meningkatkan frekuensi kehadiran pengelola kawasan perairan Kabupaten Alor, dengan demikian dapat mencegah pengguna sumberdaya untuk melakukan pelanggaran pemanfaatan sumberdaya di Kabupaten Alor.

4. Hasil dari monitoring pengamatan insidental bisa digunakan sebagai informasi penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman berbagai pihak

Untuk melakukan monitoring pengamatan insidental pengamat perlu mengenal species dan tingkah laku dari paus, lumba-lumba, duyung dan manta.

A.3. Edukasi Kepada Masyarakat

Edukasi kepada masyarakat dilakukan oleh WWF dalam bentuk penyuluhan, sosialisasi, dan pentebaran opini mengenai pentingnya menjaga kawasan konservasi pesisir untuk pemanfaatan potensi pantai yang akan membantu masyarakat menuntaskan atau minimal mengurangi masalah primer yang ada di tengah – tengah masyarakat melalui berbagai media yang ada.

WWF sebagai edukator mengajak masyarakat secara persuasif dengan melakukan penyuluhan dan sosialisasi tentang bagaimana peran masyarakat dalam mendukung program KKPD Kabupaten Alor serta memberikan peringatan tentang pentingnya menjaga ekosistem lingkungan agar potensi alam di kawasan pesisir pantai sebanjar dapat di manfaatkan semaksimal mungkin untuk upaya pengembangan pariwisata berkelanjutan di daerah tersebut. edukasi yang diberikan WWF Indonesia kepada masyarakat pesisir pantai sebanjar salahsatunya yaitu.

Pemberdayaan Masyarakat Melalui Mata Pencarian Alternatif

Pemberdayaan masyarakat melalui mata pencarian alternatif perlu dilakukan guna mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap sumber daya

dan biota yang berasosiasi di kawasan konservasi. Kegiatan awal yang perlu dilakukan adalah pengkajian mata pencaharian alternatif sedemikian sehingga sumber daya di kawasan konservasi dapat terjaga kelestariannya dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Potensi dan karakteristik desa yang bervariasi, maka mata pencaharian penduduk yang berpotensi dikembangkan juga berbeda-beda. Oleh sebab itu pengembangan mata pencaharian alternatif (MPA) harus diidentifikasi, dikaji dari aspek teoritis, ekonomi, kelestarian lingkungan (ekologis) dan sosial budaya masyarakat sehingga layak dikembangkan di lokasi/desa setempat.

Berdasarkan hasil penggalian informasi yang telah dilakukan dalam rencana penyusunan dokumen rencana pengelolaan KKPD Kabupaten Alor, masyarakat menyadari bahwa hasil tangkapan telah menunjukkan penurunan jumlah apabila dibandingkan dengan 10 tahun yang lalu. Berkurangnya hasil tangkapan tersebut disadari oleh masyarakat disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya meningkatnya kerusakan lingkungan sebagai akibat dari penangkapan dengan menggunakan bom, kurangnya fasilitas penangkapan yang dimiliki oleh nelayan, dan terbatasnya akses permodalan, serta pengetahuan yang minim tentang pengolahan hasil perikanan.¹⁵

Guna meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai penunjang kegiatan perikanan, khususnya di kawasan konservasi, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, melalui Pusat Pelatihan Kelautan

¹⁵Tulungen, 2003. Panduan Pengelolaan Wilayah Pesisir Berbasis Masyarakat. Koleksi Dokumen Proyek Pesisir 1997-2003. Seri PSWP-BM. Jakarta.

dan Perikanan, sebagai salah satu instansi yang bertanggung jawab terhadap pengembangan kualitas sumberdaya manusia kelautan dan perikanan berupaya mengatasi permasalahan tersebut dengan menyelenggarakan berbagai paket Pelatihan Mata Pencaharian Alternatif Bagi Nelayan di Musim Paceklik di berbagai kawasan di Indonesia sesuai wilayah kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Perikanan lingkup Pusat Pelatihan.

Diantara paket pelatihan tersebut adalah paket pelatihan mata pencaharian alternatif yang terdiri dari 4 jenis pelatihan sebagai berikut:

1. Pelatihan Industrialisasi Usaha Perikanan dalam Bidang Teknologi Hasil Perikanan
2. Pelatihan Industrialisasi Usaha Perikanan dalam Bidang Budidaya Perikanan
3. Pelatihan Industrialisasi Usaha Perikanan dalam Bidang Kerajinan Kulit Kerang
4. Pelatihan Peningkatan Kehidupan Nelayan dalam Bidang Permesinan Perikanan

Adapun manfaat yang diharapkan setelah mengikuti pelatihan ini adalah:

1. Nelayan/wanita nelayan mampu memproduksi kerajinan tangan dengan memanfaatkan kulit kerang yang selama ini menjadi limbah.
2. Wanita nelayan mampu meningkatkan nilai tambah ikan dengan cara mengolah bahan mentah ikan menjadi bahan baku yang siap olah seperti; baso ikan, otak-otak, pempek dan lain-lain.

3. Nelayan mampu memproduksi ikan lele melalui kegiatan budidaya pembesaran ikan lele.
4. Nelayan dapat mengurangi biaya perawatan dan perbaikan mesin, bahkan membuka usaha perbengkelan untuk mesin/motor temple maupun diesel.

A.4. Pengelolaan Dan Pemanfaatan Potensi Kawasan Pesisir Sebagai Wujud Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan Dalam Program KKPD Alor

Peran yang ketiga ini tentunya merupakan peran yang menjadi tugas utama WWF dalam mendukung program pemerintah untuk menjadikan kawasan pesisir pantai sebanjar melalui program KKPD untuk pengembangan pariwisata berkelanjutan. WWF sebagai organisasi internasional yang bergerak di bidang lingkungan memang sudah terbiasa melakukan konservasi alam. Untuk itu, kali ini WWF membantu pemerintah Alor untuk mensukseskan program KKPD ini karena hal ini merupakan tugas WWF sebagai organisasi lingkungan dunia non pemerintah untuk memperhatikan lingkungan, ekosistem dan menjadi palang pintu pemerintah setiap negara – negara yang punya perhatian khusus di bidang lingkungan untuk kepentingan bersama menjaga ekosistem lingkungan.

Maka dari itu, WWF dapat menjadi sarana untuk setiap program – program pemerintah di negara manapun yang bersifat ekologis dan ditujukan untuk menjamin keberlangsungan terawatnya ekosistem dunia agar dapat tetap dimanfaatkan untuk kepentingan apapun namun tetap dijaga keutuhannya untuk masa depan.

Setidaknya dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan di Pantai Sebanjar Terdapat delapan (8) tahapan program konservasi kawasan perairan (KKP) yang perlu dilaksanakan oleh para pemangku kepentingan dengan WWF - Indonesia melalui skema kolaborasi antara lain, yaitu:¹⁶

1. **Mengoptimalkan desain KKP.** Terdapat empat kriteria utama yang harus dipenuhi, yaitu
 - (a) memilih lokasi KKP yang memiliki nilai konservasi tinggi;
 - (b) melindungi 20-30% habitat laut penting;
 - (c) menetapkan setidaknya 1 – 20 km diameter zona inti dalam KKP; dan
 - (d) memiliki keterkaitan jarak antar KKP dibawah 100 km.
2. **Membangun jejaring KKP.** Mengintegrasikan beberapa KKP di dua atau lebih provinsi yang berdekatan ke dalam pengelolaan bersama dapat meningkatkan dampak positif KKP di area yang lebih luas dengan biaya paling minimal.
3. **Menerapkan strategi perikanan di setiap KKP** Untuk mengatur tingkat eksploitasi serta mengendalikan aktivitas penangkapan dan jumlah tangkapan untuk spesies ikan tertentu.

¹⁶ Dinas Perikanan dan Kelutan Kabupaten Alor. *Rencana Zonasi Penataan Kawasan*

4. **Memberikan hak eksklusif perikanan untuk nelayan lokal** dapat meningkatkan peran dan keterlibatan mereka dalam pengelolaan serta meningkatkan pendapatan ekonomi melalui perikanan.
5. **Mengimplementasikan praktik pengelolaan yang lebih baik** memberikan beberapa keuntungan, diantaranya strategi pengelolaan menjadi lebih efisien, meminimalisasi resiko terhadap KKP dan pengelolaan perikanan, serta mengurangi dampak lingkungan.
6. **Membangun mekanisme pendanaan berkelanjutan** untuk membiayai pengelolaan KKP dan kegiatan konservasi. Kerja sama dengan pihak swasta khususnya yang memanfaatkan sumber daya laut sebagai komoditas utama perlu didorong.
7. **Mendorong transformasi pasar perikanan** secara global dalam rangka meningkatkan permintaan produk makanan laut yang ramah lingkungan. Kerja sama dengan berbagai produsen domestik mutlak diperlukan.
8. **Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala** untuk mendokumentasikan kemajuan pengelolaan, mengidentifikasi kegiatan yang berhasil dan yang belum berhasil, serta mengeksplorasi dampak dari pengelolaan. Kerangka kerja ini dapat berjalan efektif apabila dilakukan bersama dengan berbagai pemangku kepentingan dalam skema pengelolaan bersama (*co-management*) dan diikuti oleh pendayagunaan institusi melalui peningkatan kesadaran dan kapasitas.

B. kontribusi program konservasi pesisir WWF – Indonesia terhadap pengembangan pariwisata berkelanjutan di pantai sebanjar

WWF dalam program Konservasi peraran daerah Meberikan pemahaman terhadap masyarakat pesisir pantai sebanjar terkait program koservasi ini, dan mengajak masyarak sekitar untuk turut terlibat dalam menjaga lingkungan dan ekositem di kawasan pantai sebanjar. ¹⁷ dalam melakukan hal tersebut WWF bekerjasama dengan pihak stakeholder dan tentunya masyarakat sekitar pesisir pantai untuk ikut serta dan berperan aktif dalam pembangunan yang berkelanjutan dan bersifat ekologis. Masyarakat sekitar pantai sebanjar merespons positif program konservasi pesisir dan adanya zonasi di wilayah perairan pantai sebanjar. konservasi di Kawasan ini terdiri dari tiga zona yaitu, zona inti, zona pemanfaatan, dan zona lainnya,. Nelayan merasa bahwa dengan adanya zonasi di kawasan sekitar pantai sebanjar ini, maka kelimpahan sumberdaya laut akan tetap terjaga karena banyaknya terumbu karang yang ditanam di sekitar pantai sebanjar ini. ¹⁸

Mengacu pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan kewenangan kepada daerah dalam melakukan pengelolaan kawasan pesisir dan laut sejauh 12 mil untuk provinsi dan 4 mil untuk kabupaten, maka daerah Alor sebagai daerah yang memiliki wilayah laut, diberi kewenangan untuk melakukan konservasi dan mengatur sumberdaya alam

¹⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak *Made Darma* selaku *Koordinator WWF-Indonesia* kabupaten Alor, pada tanggal 27 februari 2018

¹⁸ Hasil Wawancara dengan Kepala Dinas Kelautan Dan Perikana Kabupaten Alor. 28 februari 2018

di tingkat daerah sebagaimana tercantum dalam pasal 18:1 Undang-undang No.32 tahun 2004. Kewenangan tersebut meliputi: eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut, pengaturan administrasi, pengaturan tata ruang, dan penegakan hukum.

Hal ini merupakan peluang bagi Kabupaten Alor untuk menetapkan kawasan konservasi perairan dan melakukan pengaturan pengelolaan KKPD Kabupaten Alor sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah. Mengacu pada hal tersebut program konservasi WWF- Indonesia di Pantai Sebanjar dengan para pemangku kepentingan (Pemerintah Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur) memberikan pengaruh terhadap pengembangan pariwisata berkelanjutan di pantai sebanjar melalui Pengelolaan Kolaborasi Melibatkan Para Pemangku Kepentingan.

Artinya, model pengelolaan kawasan konservasi yang dipilih untuk dikembangkan dalam pengelolaan KKPD Kabupaten Alor adalah pengelolaan berbasis masyarakat dengan pendekatan *adaptive collaborative management (ACM)*. Pendekatan *adaptive collaborative management (ACM)* adalah suatu proses yang bertujuan mendorong para pemangku kepentingan untuk bekerja sama dalam merencanakan, melaksanakan, mengamati, dan mengambil pelajaran dari pelaksanaan rencana mereka di masa lalu pengelolaan dengan pendekatan kolaborasi membutuhkan kerjasama dari semua para pemangku kepentingan yang bersentuhan langsung dan atau tidak langsung terhadap kawasan KKPD Kabupaten Alor. Oleh karena itu, kebijakan dalam penetapan KKPD Kabupaten Alor dan penyusunan dokumen Rencana Pengelolaan KKPD dilakukan melalui

konsultasi publik yang melibatkan seluruh para pemangku kepentingan (*stakeholders*) mulai tingkat desa hingga tingkat kabupaten.

Proses pengelolaan sumberdaya di KKPD Kabupaten Alor mengikuti serangkaian tahap atau langkah yang berbentuk siklus kebijakan yang dimulai dengan (1). identifikasi isu, (2). persiapan program, (3). adopsi program, persetujuan dan pendanaan, (4). implementasi atau pelaksanaan, dan (5). pemantauan (monitoring) dan evaluasi, Masing-masing langkah dalam proses ini saling terkait dan saling mendukung. Satu siklus pengelolaan hingga tahap pemantauan dan evaluasi disebut satu generasi pengelolaan sumberdaya pesisir terpadu berlangsung selama 5 tahun.¹⁹

Mengacu pada kebijakan pewilayahan perairan melalui sistem zonasi, maka sebagai suatu bagian dari langkah-langkah pengelolaan dan perlindungan sumber daya laut, pengembangan dan pengelolaan wilayahakan dikembangkan disesuaikan dengan potensi sumber daya lokal dan ramah lingkungan dengan melibatkan peran aktif masyarakat. Keterlibatan aktif masyarakat secara luas merupakan inti penting dalam sistem pengelolaan dalam sumber daya laut. Untuk itu, masyarakat yang kehidupannya tergantung dengan sumber daya ini perlu diberdayakan baik pada level perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasannya. Secara teoritik pemberdayaan (*empowerment*) masyarakat sebagai salah satu

¹⁹ Departemen Kelautan dan Peikanan, 2007. Panduan Penyusunan Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi Laut Daerah. Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Departemen Kelautan dan Perikanan. Jakarta.

stakeholders dalam pengelolaan KKPD Kabupaten Alor, dapat diartikan sebagai upaya untuk menguatkan masyarakat dengan cara memberikan motivasi dan dorongan kepada masyarakat agar menggali potensi dirinya dan berani bertindak untuk memperbaiki kualitas hidupnya salah satu cara untuk memperbaiki kualitas hidupnya diantaranya adalah melibatkan mereka untuk berpartisipasi aktif dalam pengelolaan lahan pesisir. Partisipasi ini tidak hanya sekedar mendukung program - program pemerintah, tetapi sebagai kerjasama antara masyarakat dan pemerintah dalam merencanakan, melaksanakan, melestarikan dan mengembangkan program - program pengelolaan di kawasan konservasi.

Kegiatan pengelolaan KKPD Kabupaten Alor bertujuan untuk menjamin keberlanjutan pengusahaan dan pemanfaatan kawasan dan kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan di dalam kawasan. Dengan demikian, pengelolaan berkelanjutan kawasan ini dapat tercapai sebagaimana yang diharapkan, melalui pemeliharaan sistem ekologi dan pemanfaatan yang lestari untuk jangka panjang.

Keberlanjutan pemanfaatan lestari jangka panjang sangat bergantung pada (1) ketersediaan informasi berkaitan dengan keanekaragaman dan tingkat kelestarian sumberdaya alam, (2) pola pemanfaatan secara bersama baik atas wilayah laut sebagai wilayah fisik dan juga sumberdaya alam yang ada, dan (3) kebijakan pengelolaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Alor. Ketersediaan tiga komponen yang dibutuhkan untuk menciptakan kemampuan para pemangku kepentingan dalam memberikan respon terhadap perubahan yang terjadi setiap satuan waktu.

Kaitannya dengan kecepatan memberikan respon terhadap perubahan, maka beberapa metode dan teknik yang digunakan untuk menentukan tiga komponen perlu dilakukan melalui kegiatan pemantauan yang adaptif, Pengelolaan adaptif merupakan suatu cara bagi para pemangku kepentingan untuk mengambil langkah secara bertanggung jawab ketika menghadapi perubahan dan selanjutnya berdasarkan kemampuan dan kewenangan yang dimiliki secara bersama - sama menetapkan sebuah keputusan.

B.1. Pembangunan Aspek ekonomi, Sosial dan Lingkungan melalui program konservasi pesisir WWF – Indonesia

Penerapan KKPD di Kabupaten Alor dilaksanakan untuk pembangunan yang bersifat ekonomis dan ekologis. Artinya, selain masyarakat dapat meningkatkan taraf hidupnya yang akan membantu meningkatkan pembangunan ekonomi daerah dari pendapatan perkapita, masyarakat juga dapat belajar memanfaatkan potensi alam tanpa harus mengeksploitasi sumberdaya alam sekitarnya secara berlebihan yang akan berdampak pada rusaknya ekosistem lingkungan sekitar pesisir Pantai Sebanjar. Pada akhirnya, keuntungan secara ekonomi ini dapat berlangsung secara berkelanjutan dan berlangsung terus menerus hingga generasi yang akan datang.²⁰

Berdasarkan Visi dan Misi Pemerintah kabupaten Alor yang Mengacu pada kecenderungan perubahan global dan kebijakan pembangunan daerah

²⁰ BPS Kabupaten Alor, 2011. Indikator Ekonomi Kabupaten Alor Tahun 2011. BPS Kabupaten Alor. Kalabahi.

baik tingkat provinsi dan kabupaten sebagai unsur peluang atau ancaman serta kondisi sarana-prasarana, sumberdaya manusia, sumberdaya alam di Kawasan Konservasi Perairan Daerah Kabupaten Alor sebagai unsur kekuatan atau kelemahan, maka dipandang perlu untuk merumuskan visi pengelolaan KKPD Kabupaten Alor. Visi pengelolaan tersebut didasarkan pada visi Kabupaten Alor dan isu-isu pengelolaan wilayah kawasan konservasi perairan daerah yang diformulasikan berdasarkan hasil konsultasi publik dengan para pemangku kepentingan/*stakeholders* (pemerintah dan non pemerintah).

Maka pariwisata berkelanjutan dilaksanakan sebagai bentuk pelaksanaan penerapan pembangunan berkelanjutan di daerah daerah di Indonesia dalam menghadapi tantangan di era milenium. Tak terkecuali di Pantai Sebanjar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan (stakeholder) di daerah tersebut membuat program Kawasan Konservasi Pesisir Daerah (Prgram KKPD), yang mana program ini bertujuan untuk memanfaatkan potensi lingkungan yang ada seperti pesisir pantai untuk kepentingan pembangunan yang tidak hanya memperhatikan segi pembangunan fisik atau infrastruktur, tetapi juga menitikberatkan pada sisi ekologis (lingkungan) daerah kawasan konservasi yang akan memberikan manfaat akan peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar secara berkelanjutan. Dalam artian efeknya akan berlanjut kepada generasi yang akan datang dan seterusnya.²¹

²¹ WWF, 2008. Pola Pemanfaatan Sumberdaya Laut dan Pesisir serta Kondisi Sosial Ekonomi Desa Target WWF di Kabupaten Alor. Kalabahi.

Dampaknya akan dapat dirasakan oleh semua kalangan masyarakat. Karena sejatinya pembangunan berkelanjutan akan senantiasa melibatkan peran aktif masyarakat dalam tata pengelolaannya. Efek dari penerapan kebijakan KKPD sebagai bentuk pembangunan pariwisata berkelanjutan di kabupaten Alor setidaknya akan terasa di beberapa bidang, yaitu Bidang ekonomi, Sosial dan lingkungan pada masyarakat kabupaten Alor khususnya di Pantai Sebanjar yang menjadi kawasan konservasi pesisir.

b. Aspek sosial

Pada bidang sosial, manfaat yang dapat di rasakan oleh masyarakat terkait hasil dari kebijakan KKPD Kabupaten Alor di Pantai Sebanjarr adalah melekatnya warisan budaya yang sama, warisan tanah suku dan harta material yang sama, perkawinan antar individu dengan keterlibatan keluarga dan suku yang selanjutnya membentuk sebuah keluarga besar. Relasi sosial antar warga masyarakat wilayah ini diwarnai oleh pola relasi kekerabatan yang begitu kuat.

Pola relasi kekerabatan dimaksud adalah ikatan keanggotaan seseorang individu kedalam suatu keluarga yang terbina secara vertikal dan horisontal baik lewat perkawinan maupun lewat keturunan darah. Kemajemukan yang ada dieratkan oleh semangat saling menghargai, bekerjasama, rasa persaudaraan dan kekeluargaan. Hal ini dapat ditemukan

dan dibaca dari ungkapan-ungkapan tradisional yang banyak berkisah tentang pentingnya membangun kerjasama dan semangat kekeluargaan untuk membangun pulau kenari (Kabupaten Alor).

Dinamika kelompok sebagai salah satu ciri kehidupan sosial kemasyarakatan di Kabupaten Alor ditandai dengan terbentuknya berbagai jenis lembaga untuk mengakomodasi seluruh aktivitas sosial. Sebagai contoh, di Desa Blang Merah, terdapat beberapa lembaga desa yang berperan dalam kehidupan sosial dan pemerintahan yaitu Pemerintah Desa, Lembaga Adat, Badan Perwakilan Desa, PKK. Selain itu juga ada kelompok-kelompok di masyarakat yang dibentuk oleh dinas-dinas yang ada di kabupaten maupun atas inisiatif masyarakat setempat seperti: Kelompok nelayan, tani dan ternak, rumput laut, karang taruna, adat, tenun, remaja masjid, kelompok bangunan dan lain-lain. Keberadaan lembaga-lembaga tersebut menunjukkan dinamika hidup berkelompok dalam masyarakat cukup tinggi. Selain keberadaan lembaga sebagai salah satu bentuk dinamika kelompok yang cukup baik, pembagian tugas dan tanggungjawab pekerjaan yang dilakukan secara bersama-sama telah menjadi kebiasaan hidup bersama.

b. aspek ekonomi

Sedangkan Pada bidang Ekonomi atau secara profit (keuntungan) yang bersifat matematis yang didapatkan oleh Kabupaten Alor di Pantai Sebanjar adalah meningkatnya taraf hidup masyarakat di Kabupaten Alor sebagai akibat dari adanya pembangunan pariwisata berkelanjutan di daerah

tersebut. Adeanya penerapan kebijakan KKPD dapat membantu masyarakat untuk belajar memanfaatkan potensi alam sekitar yang dapat digunakan untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat dari sisi ekonomi dan menjamin keberlangsungan hidup masyarakat sehari – hari.

Penerapan KKPD di Kabupaten Alor dilaksanakan untuk pembangunan yang bersifat ekonomis dan ekologis. Artinya, selain masyarakat dapat meningkatkan taraf hidupnya yang akan membantu meningkatkan pembangunan ekonomi daerah dari pendapatan perkapita, masyarakat juga dapat belajar memanfaatkan potensi alam tanpa harus mengeksploitasi sumberdaya alam sekitarnya secara berlebihan yang akan berdampak pada rusaknya ekosistem lingkungan sekitar pesisir Pantai Sebanjar. Pada akhirnya, keuntungan secara ekonomi ini dapat berlangsung secara berkelanjutan dan berlangsung terus menerus hingga generasi yang akan datang.

c. aspek lingkungan

Pada Bidang Lingkungan, dampak pembangunan pariwisata berkelanjutan akan sangat terasa. Dikarenakan model pembangunan ini memang menitikberatkan lingkungan sekitar sebagai salah satu aspek terpenting dalam pengaplikasiannya. Pada dasarnya program KKPD Kabupaten Alor di Pantai sebanjar sangat memperhatikan aspek lingkungan guna memberikan manfaat kepada masyarakat sekitar kawasan konservasi untuk mewujudkan pengelolaan dan pemanfaatan kawasan konservasi

dengan memperhatikan kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan dengan melibatkan masyarakat sebagai pemangku kepentingan.

Selain itu dampak dari penerapan KKPD di bidang lingkungan adalah terciptanya optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan kawasan untuk meningkatkan kelestarian sumber daya alam dan lingkungan berbasis masyarakat yang berujung pada Meningkatnya usaha perikanan tangkap dan budidaya yang ramah lingkungan, Tersedianya sarana prasarana usaha perikanan yang ramah lingkungan, Meningkatnya keterampilan masyarakat dalam usaha perikanan, berkembangnya sistem pemasaran usaha perikanan yang memberikan keberpihakan pada nelayan, tersedianya akses permodalan bagi nelayan untuk mengembangkan usaha perikanan, serta tercapainya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya melakukan kegiatan penangkapan ikan yang ramah lingkungan yang pada akhirnya akan menghasilkan peningkatan kesadaran masyarakat tentang arti penting melakukan penangkapan dan pengumpulan biota akuatik yang ramah lingkungan dan menurunnya aktivitas penangkapan dan pengumpulan biota akuatik melalui kegiatan penangkapan yang tidak ramah lingkungan.

Mengacu pada kebijakan pewilayahan perairan melalui sistem zonasi, maka sebagai suatu bagian dari langkah-langkah pengelolaan dan perlindungan sumber daya laut, pengembangan dan pengelolaan wilayahakan dikembangkan disesuaikan dengan potensi sumber daya lokal dan ramah lingkungan dengan melibatkan peran aktif masyarakat. Keterlibatan aktif

masyarakat secara luas merupakan inti penting dalam sistem pengelolaan dalam sumber daya laut. Untuk itu, masyarakat yang kehidupannya tergantung dengan sumber daya ini perlu diberdayakan baik pada level perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasannya. Secara teoritik pemberdayaan (*empowerment*) masyarakat sebagai salah satu *stakeholders* dalam pengelolaan KKPD Kabupaten Alor, dapat diartikan sebagai upaya untuk menguatkan masyarakat dengan cara memberikan motivasi dan dorongan kepada masyarakat agar menggali potensi dirinya dan berani bertindak untuk memperbaiki kualitas hidupnya salah satu cara untuk memperbaiki kualitas hidupnya diantaranya adalah melibatkan mereka untuk berpartisipasi aktif dalam pengelolaan lahan pesisir. Partisipasi ini tidak hanya sekedar mendukung program-program pemerintah, tetapi sebagai kerjasama antara masyarakat dan pemerintah dalam merencanakan, melaksanakan, melestarikan dan mengembangkan program-program pengelolaan di kawasan konservasi.

Kegiatan pengelolaan KKPD Kabupaten Alor bertujuan untuk menjamin keberlanjutan pengusahaan dan pemanfaatan kawasan dan kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan di dalam kawasan. Dengan demikian, pengelolaan berkelanjutan kawasan ini dapat tercapai sebagaimana yang diharapkan, melalui pemeliharaan sistem ekologi dan pemanfaatan yang lestari untuk jangka panjang.

Keberlanjutan pemanfaatan lestari jangka panjang sangat bergantung pada (1) ketersediaan informasi berkaitan dengan keanekaragaman dan tingkat kelestarian sumberdaya alam, (2) pola pemanfaatan secara bersama baik atas

wilayah laut sebagai wilayah fisik dan juga sumberdaya alam yang ada, dan (3) kebijakan pengelolaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Alor. Ketersediaan tiga komponen yang dibutuhkan untuk menciptakan kemampuan para pemangku kepentingan dalam memberikan respon terhadap perubahan yang terjadi setiap satuan waktu.

Kaitannya dengan kecepatan memberikan respon terhadap perubahan, maka beberapa metode dan teknik yang digunakan untuk menentukan tiga komponen perlu dilakukan melalui kegiatan pemantauan yang adaptif, Pengelolaan adaptif merupakan suatu cara bagi para pemangku kepentingan untuk mengambil langkah secara bertanggung jawab ketika menghadapi perubahan dan selanjutnya berdasarkan kemampuan dan kewenangan yang dimiliki secara bersama-sama menetapkan sebuah keputusan.

B.2. Pengusahaan dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi

Pengusahaan dan pemanfaatan kawasan konservasi adalah upaya pengelolaan yang memberikan peluang untuk mendatangkan sejumlah nilai dan memberikan nilai untuk kehidupan masyarakat melalui pemanfaatan potensi jasa (baik berupa jasa penyediaan *provisioning services*, pengaturan atau *regulating services*, maupun budaya *cultural services*) yang diberikan oleh fungsi ekosistem dengan tidak merusak dan mengurangi fungsi pokok ekosistem tersebut.²²

²² WWF, 2012. Panduan Program Pemantauan Pemanfaatan Sumberdaya Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) Kabupaten Alor. WWF. Kalabahi.

Program kawasan konservasi pesisir daerah di Pantai Sebanjar kabupaten Alor Provinsi NTT ini diharapkan dapat mampu membantu masyarakat dalam berbagai hal untuk memecahkan masalah kehidupannya. Untuk itu perlu adanya peran dari pemerintah dalam pengembangannya. Pengembangan pariwisata harus merupakan pengembangan yang terencana secara menyeluruh, sehingga dapat diperoleh manfaat yang optimal bagi masyarakat, baik dari segi ekonomi, sosial, dan cultural. Perencanaan tersebut harus mengintegrasikan pengembangan pariwisata ke dalam suatu program pembangunan ekonomi, fisik, dan sosial dari suatu Negara.

Peran pemerintah dalam mengembangkan pariwisata secara garis besarnya adalah menyediakan infrastruktur (tidak hanya dalam bentuk fisik), memperluas berbagai bentuk fasilitas, kegiatan koordinasi antara aparatur pemerintah dengan pihak swasta, pengaturan dan promosi umum ke daerah lain maupun ke luar negeri. Pemerintah mempunyai otoritas dalam pengaturan, penyediaan, dan peruntukan berbagai infrastruktur yang terkait dengan kebutuhan pariwisata. Tidak hanya itu, pemerintah bertanggung jawab dalam menentukan arah yang dituju perjalanan pariwisata. Kebijakan makro yang ditempuh pemerintah merupakan panduan bagi stakeholder yang lain di dalam memainkan peran masing-masing. Pengembangan daerah pariwisata secara tidak langsung akan menimbulkan perubahan-perubahan sosial di kalangan masyarakat setempat. Untuk itu perlu adanya perencanaan yang

mencakup aspek sosial untuk mencegah perubahan kearah yang negatif. Dua hal yang perlu dilakukan oleh pihak pemerintah dan perencana yaitu yang pertama adalah melakukan penelitian dampak sosial yang mungkin ditimbulkan untuk merancang beberapa usaha pengembangan sehingga dampak positif bisa dimaksimalkan dan dampak negatifnya diperkecil. Yang kedua adalah sejauh mungkin mengikutsertakan masyarakat setempat dalam perencanaan dan pengembangan. Penduduk setempat harus mengetahui bahwa mereka mempunyai kepentingan terhadap keberhasilan daerah pariwisata yang bersangkutan.

Beberapa peran yang mutlak menjadi tanggung jawab pemerintah adalah Penegakan dan konsistensi tentang tata guna lahan untuk pengembangan kawasan wisata, termasuk kepastian hak kepemilikan, sistem persewaan, dan sebagainya. Selain itu, Perlindungan lingkungan alam dan cagar budaya untuk mempertahankan daya tarik objek wisata, termasuk aturan pemanfaatan sumberdaya lingkungan tersebut, penyediaan infrastruktur (jalan, pelabuhan, bandara, dan angkutan) pariwisata. Fasilitas fiskal, pajak, kredit, dan izin usaha yang tidak rumit agar masyarakat lebih terdorong untuk melakukan wisata dan usaha-usaha pariwisata semakin cepat berkembang. Keamanan dan kenyamanan berwisata melalui penugasan polisi khusus pariwisata di kawasan-kawasan wisata dan uji kelayakan fasilitas wisata, jaminan kesehatan di daerah tujuan wisata melalui sertifikasi kualitas lingkungan dan mutu barang yang digunakan wisatawan. penguatan kelembagaan pariwisata dengan cara memfasilitasi dan memperluas jaringan

kelompok dan organisasi kepariwisataan. Pendampingan dalam promosi wisata, yakni perluasan dan intensifikasi jejaring kegiatan promosi di dalam dan di luar negeri, regulasi persaingan usaha yang memungkinkan kesempatan yang sama bagi semua orang untuk berusaha di sektor pariwisata, melindungi UKM wisata, mencegah perang tarif, dan sebagainya.

Intinya bahwa program konservasi perairan daerah yang di prakarsai oleh WWF – Indonesia dan pemerintah daerah di Pantai Sebanjar kabupaten Alor memiliki pengaruh bagi keberlangsungan terhadap aktivitas pengembangan pariwisata berkelanjutan di kawasan tersebut yang akan memberikan manfaat tidak hanya bagi pembangunan daerah Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, dan ekologi (lingkungan) tetapi juga memberikan kontribusi dan sumbangsi untuk generasi yang akan datang.

program yang direncanakan pemerintah daerah dapat memberikan alternatif solusi terhadap masalah yang dihadapi masyarakat khususnya mereka yang memiliki ketergantungan dalam menitikberatkan profesinya sebagai nelayan atau masyarakat yang tinggal di atau dekat area pesisir. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bagi para masyarakat yang sangat tergantung dengan hasil laut, implementasi komponen tata kelola pada program KKPD yang terintegrasi dalam program pariwisata kemudian membuat mereka tetap dapat Memanfaatkan daerah pesisir sehingga dapat tetap lestari. Bagi masyarakat yang berada di sekitar area pantai sebanjar, dengan tata kelola yang sesuai dengan program KKPD yang mengacu pada

prinsip prinsip *pembangunan pariwisata berkelanjutan*, mereka dapat memanfaatkan potensi-potensi yang dimiliki pantai Sebanjar untuk kepentingan ekonomi dan sosial.



BAB 5

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan adanya program KKPD yang dirancang oleh pemerintah Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Program yang ditujukan untuk pembangunan dan peningkatan sektor pariwisata ini diharapkan mampu mendongkrak perekonomian daerah yang nantinya akan dapat mengatasi masalah – masalah primer seperti pembangunan sumberdaya manusia, penuntasan kemiskinan di kawasan konservasi pesisir Pantai Sebanjar Kabupaten Alor,

Hal ini di tujukan untuk menjaga ekosistem dan lingkungan selain itu pemerintah diharapkan mampu menunjukkan kepeduliannya terhadap tata kelola lingkungan yang lebih baik, dikarenakan hal ini menjadi penentu masa depan kawasan pesisir yang lebih baik dari sebelumnya, program konservasi pesisir ini ditujukan atas dasar kepedulian terhadap ekosistem, ekologi lingkungan sekitar khususnya daeran pesisir pantai.

B. Saran

Saran yang dapat di berikan kepada para pengstudi HI yang ingin meneliti tentang Program KKPD Kabupaten Alor (NTT) yaitu (1). Lebih memperdalam fakta mengenai objek penelitian agar dapat di temukan aspek kebaruannya sehingga, mampu menemukan sesuatu yang baru untuk memaparkan hasil penelitian yang lebih sempurna dari penelitian sebelumnya. (2). Memperbaharui

sumber data yang lebih falid dan lebih terkini mengenai program KKPD Kabupaten Alor agar dapat memaparkan fakta seobjektif mungkin sehingga mudah dilihat aspek kebaruannya.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Baker, Susan. 2006. *Theoretical and Conceptual of Sustainable Development*. London: Routledge

Chasek, Pam S. & Miller, Marion A. L. 2005. "Sustainable Development" dalam Michael T. Snarr & D. Neil Snarr (ed.), *Introducing Global Issues*, Lynne Rienner Publisher

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Alor, 2016, "*Buku Profil Kebudayaan Kabupaten Alor*". diterbitkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Alor.

Rina, Kurniawati. 2010. "*Modul Pariwisata Berkelanjutan*" *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, Vol.14 No.3

Yulius P. Hermawan. 2007. *Transformasi Dalam Studi Hubungan Internasional; Aktor, Isudan Metodologi*. Yogyakarta :Grahainmu.

Jurnal :

Abdurrahman, "*Pembangunan Berkelanjutan Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Indonesia*" Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia RI Juli 2003.

Cri Murthi Adi, *Prinsip – Prinsip Pembangunan Berkelanjutan*, *Caretourism* Vol 1 issue (2), June, 2016.

Joko Tri Hryanto. (2014), "*Model Pengembangan Ekowisata Dalam Mendukung Kemandirian Ekonomi Daerah Studi Kasus Provinsi DIY*", *KAWISTARA*. VOLUME 4 No. 3, 22 Desember 2014 Halaman 225-330

Lely Syiddatul Akliyah, Muhammad Zulkarnain Umar. "*Analisis Daya Dukung Kawasan Wisata Pantai Sebanjar Kabupaten Alor Dalam Mendukung Pariwisata Yang Berkelanjutan*", *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, Vol.13 No.2

Tulungen, 2003. *Panduan Pengelolaan Wilayah Pesisir Berbasis Masyarakat*. Koleksi Dokumen Proyek Pesisir 1997-2003. Seri PSWP-BM. Jakarta.

Martha Fani Cahyandito. (2006), "*Pembangunan Berkelanjutan, Ekonomi Dan Ekologi, Sustainability Communication Dan Sustainability Reporting*", ResearchGate : <https://www.researchgate.net/publication/228221977>.

Ishartono, Santoso Tri Raharjo. 2011. “*Sustainable Development Goals (Sdgs) Dan Pengentasan Kemiskinan*”. Social Work Jurnal Volume: 6 Nomor: 2 Halaman: 154 - 272: Universitas Padjadjaran

Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan : Keterlibatan Masyarakat Lokal dan Peran Pemimpin Lokal di Kampung Sawinggrai Kabupaten Raja Ampat. “*Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan dan Kelembagaan*” diterbitkan Oleh :Universitas_Kristen Satya Wacana, Salatiga, Jawa Tengah

Laporan :

Dinas Perikanan dan Kelutan Kabupaten Alor. *Potensi ekologi sosial ekonomi dan permasalahan pengelolaan*

Dinas Perikanan dan Kelutan Kabupaten Alor. *pengelolaan sumberdaya kawasan*

Dinas Perikanan dan Kelutan Kabupaten Alor. *Rencana Zonasi Penataan Kawasan*

WWF, 2012. Panduan Pemantauan Pemijahan Ikan (*Spawning Aggregations* atau SPAGs) di Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) Kabupaten Alor. WWF. Kalabahi.

BPS Kabupaten Alor, 2011. Indikator Ekonomi Kabupaten Alor Tahun 2011. BPS Kabupaten Alor. Kalabahi

Departemen Kelautan dan Peikanan, 2007. *Panduan Penyusunan Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi Laut Daerah*. Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Departemen Kelautan dan Perikanan. Jakarta.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Alor, 2010. Draft Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata Kabupaten Alor Tahun 2010-2020. *Dinas Kebudayaan dan Parwisata Kabupaten Alor. Kalabahi.*

Internet :

Puspitasari, Irfa. 5 Maret 2013. “ materi Kuliah Pembangunan Dunia Berkelanjutan Minggu ke-2”. Departemen Hubungan Internasional, Universitas Airlangga 2013 diakses dari : http://ergy-g-hfisip10.web.unair.ac.id/artikel_detail-

[81888Pembangunan%20Dunia%20BerkelanjutanPembangunan%20Berkelanjutan:%20Konsep%20dan%20Perkembangan.html](http://www.pedomanwisata.com/wisata-bahari-pantai/diving/kepulauan-alor-wisata-bahari-yang-menakjubkan-di-ujung-timur-flores)

<http://www.pedomanwisata.com/wisata-bahari-pantai/diving/kepulauan-alor-wisata-bahari-yang-menakjubkan-di-ujung-timur-flores> . diakses tanggal 11 november 2017.

<http://alorkab.go.id/new/index.php/profil/flora-fauna1>

<http://catatanbackpacker.tumblr.com/post/117897996654/spot-110-pantai-jawa-toda-alor->

<http://sejarah.kompasiana.com/2013/06/08/jangan-heran-al-Qur'an-tertua-di-asia-ada-di-alor-ntt-567050.html>

<http://www.Babahboim.wordpress.com>

http://www.kompasiana.com/arnoldasyeradoe/mengenal-kadiding-alat-musik-tradisional-dari-pulau-alor_566a3a9ff37e610e05b1a27d

<http://www.wisatanesia.com/2010/06/perkampungan-tradional-monbang.html>

Sumber Gambar:

<https://pbs.twimg.com/media/B5g2bvoIAAApyZu.jpg>

<http://cdn.pergidulu.com/wp-content/uploads/2013/01/Kenari.jpg>

<http://3.bp.blogspot.com/W5fWvCUPIC4/VqFyfxsTJBI/AAAAAAAAAuE/FfNwUEoS2og/s1600/Taman%2BLaut%2BSelat%2BPantar%2B5.jpg>

Lampiran

Draf pertanyaan

1. Apa Yang dilakukan WWF Selama ini, untuk merealisasikan Program

Konservasi Pesisir di Pantai Sebanjar ?

Jawaban.

Meberikan pemahaman terhadap masyarakat pesisir pantai sebanjar terkait program koservasi ini, dan mengajak masyarak sekitar untuk turut terlibat dalam menjaga lingkungan dan ekositem di kawasan pantai sebanjar.

2. Apa tanggapan masyarakat sekitar Pantai Sebanjar terhadap Program

Konservasi Pesisir?

Jawab.

Masyarakat sekitar pantai sebanjar merespons positif program konservasi pesisir dan adanya zonasi di wilayah perairan pantai sebanjar. konservasi di Kawasan ini terdiri dari tiga zona yaitu, zona inti, zona pemanfaatan, dan zona lainnya,. Nelayan merasa bahwa dengan adanya zonasi di kawasan sekitar pantai sebanjar ini, maka kelimpahan sumberdaya laut akan tetap terjaga karena banyaknya terumbu karang yang ditanam di sekitar pantai sebanjar ini.

3. Siapa saja aktor yang dilibatkan dalam Program Konservasi Pesisir WWF –

Indonesia khususnya di Pantai Sebanjar?

Jawab.

Dalam program konservasi pesisir ini NGO yang turut terlibat dan membatu pemerintah daerah dan turut mendampingi dinas perikanan dan kelautan dalam melaksanakan program konservasi pesisir ini adalah WWF - Indonesia

4. Sudah Sejauh mana Program Konservasi Pesisir WWF – Indonesia di Pantai

Sebanjar berjalan ?

Jawab.

Seperti sebelumnya bahwa saat ini suda masuk pada tahap pengelolaan, namun tentunya harus ada tahapan tahapan yang di

lakukan dalam mencapai tujuan program konservasi tidak bisa kita langsung mengklaim berjalan 100% tapi step by step.

5. Mengapa Program Konservasi Pesisir WWF – Indonesia Ini penting untuk direalisasikan ?

Jawab.

Mengingat latar belakang kabupaten Alor adalah wilayah kepulauan dan hampir sebagian masyarakat kabupaten Alor adalah nelayan maka dari itu penting untuk di berlakukannya kawasan konservasi ini untuk mencegah penangkapan yang dapat merusak habitat satwa dan karang karang yang di lindungi,

6. Bagaimana Tahap – tahap pelaksanaan Program Konservasi Pesisir WWF – Indonesia di Pantai Sebanjar ini dilakukan ?

Jawab.

Wwf indonesia bersama dinas perikanan dan kelautan melakukan survei ke beberapa titik lokasi yang akan di tetapkan sebagai kawasan konservasi, bersosialisasi dengan masyarakat pesisir tentang program konservasi ini, Memberikan pemahaman pemahaman terkait program konservasi ke masyarakat setempat. Terutama nelayan.

7. Apa saja hambatan yang didapatkan dalam pelaksanaan Program Konservasi Pesisir WWF – Indonesia di Pantai Sebanjar ?

Jawab.

Adapun Hambatan dalam program konservasi ini terkait dengan APBD meski dengan anggaran yang terbatas pemerintah kab Alor terus melanjutkan program konservasi ini,

8. Bagaimana korelasi antara Program Konservasi Pesisir WWF – Indonesia di Pantai Sebanjar dengan perkembangan Pariwisata berkelanjutan di pantai tersebut ?

Jawab :

Yang paling utama sih pengawasan itu yang paling utama karena disana masih banyak nelayan yang masyuk dan melanggar aturan yang dibuat

oleh pihak pengelola, jadi yang paling kami upayakan adalah pengawasan.

9. Apa manfaat Program Konservasi Pesisir WWF – Indonesia di Pantai Sebanjar terhadap perkembangan Pariwisata berkelanjutan?

Jawab:

Karena program kawasan konservasi sebagai tol untuk menjaga ekosistem pemanfaatan kawasan konservasi untuk kepentingan pariwisata dan kepentingan pembangunan daerah berbasis lingkungan.

10. Apa saja upaya yang dilakukan untuk menjaga keberlangsungan Program Konservasi Pesisir WWF – Indonesia di Pantai Sebanjar ?

Jawaban.

Melibatkan masyarakat sekitar pantai sebanjar dalam menjaga lingkungan dan ekosistem di kawasan ini. Dan membentuk Pokmaswas (Kelompok Masyarakat Pengawas) kelompok ini juga turut memberikan andil yang besar terhadap keberadaan sanksi di kawasan ini. Pokmaswas sendiri mempunyai peran untuk mengawasi dan menjaga daerah Kawasan Taman Pesisir ini dan juga memberikan sanksi kepada para pelanggar, seperti yang diungkapkan oleh salah satu anggota pokmaswas, biasanya jika ada nelayan atau warga yang merusak dan menggunakan alat-alat yang dilarang, nelayan sekitar pantai sebanjar pasti akan menegurnya, kalau masih melakukan nya kita akan lapor kepada dinas dan polisi”